



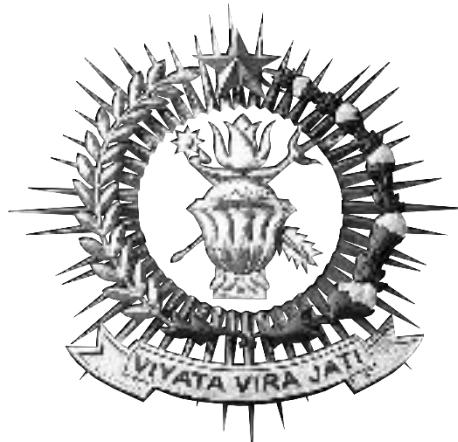


# KAJIAN TENTANG PERAN TNI AD DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI NASIONAL

BANDUNG, DESEMBER 2015







**KAJIAN TENTANG**  
**PERAN TNI AD DALAM MEWUJUDKAN**  
**KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI**  
**NASIONAL**

**Bandung, Desember 2015**

## **ABSTRAKSI**

Kebijakan pemerintah tentang pencapaian ketahanan pangan dan energi sangat berkaitan erat dengan dinamika lingkungan strategis yang terus bergerak. Perubahan iklim global, krisis pangan dan energi memaksa setiap negara untuk mencari sumber-sumber baru energi, pangan dan air. Dorongan akan pemenuhan kebutuhan tersebut ditengarai dapat menyebabkan instabilitas sampai dengan konflik jika tidak dipersiapkan dengan komprehensif oleh setiap pemangku kepentingan. TNI AD sebagai salah satu pemangku kepentingan bertekad untuk menyeraskan perannya dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional, regional bahkan global. Salah satu bentuk peran tersebut adalah melalui pencapaian wujud ketahanan pangan dan energi nasional sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Pada Triwulan IV TA 2015 ini, Seskoad membuat suatu kajian dengan judul **“Peran TNI AD dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional”**. Judul kajian ini diusung mengingat pentingnya masalah yang menjadi program oleh pemerintah yaitu ketahanan pangan dan energi nasional. Bentuk ancaman baru berupa *proxy war* yang mengarah pada sumber energi, pangan dan air merupakan penghubung langsung pentingnya peran TNI AD sebagai pemangku kepentingan di bidang pertahanan. Guna mendapatkan formulasi yang tepat akan peran TNI AD dalam program pemerintah tersebut, perlu dikupas efektifitas dan efisiensi peran itu sendiri.

Dalam kajian kali ini akan diawali dengan latar belakang mengapa TNI AD perlu berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional. Bagian berikutnya akan mengangkat data dan fakta tentang sejarah dan peran yang telah dikerjakan oleh TNI AD. Sebagai pembanding akan dimunculkan pula fakta keterlibatan militer beberapa negara

dalam mendukung kepentingan nasional negaranya di bidang energi dan pangan. Analisa seluruh data tersebut ditampilkan pada bagian selanjutnya, sekaligus langkah strategis yang menjadi upaya yang disarankan. Pada bagian akhir, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penentu kebijakan selanjutnya.

Tim Pokja Kajian TW IV selaku tim penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan kajian ini. Untuk itu, Tim Penulis selalu mengharapkan saran konstruktif guna hasil kajian yang lebih berkualitas di masa mendatang.

Bandung, Desember 2015

Sdirbinjianbang Seskoad

## **DAFTAR ISI**

### **ABSTRAKSI**

### **BAB I**

PENDAHULUAN .....	1
-------------------	---

1. Umum.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	4
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.....	4
4. Metode dan Pendekatan. ....	5

### **BAB II**

LATAR BELAKANG .....	7
----------------------	---

5. Umum. ....	7
6. Landasan. ....	9
a. Landasan Yuridis.....	9
b. Landasan Operasional.....	11
c. Landasan Teori. ....	13
7. Dasar Pemikiran. ....	16
a Kondisi Global dan Regional Asia Pasifik .....	16
b. Kondisi Nasional.....	21
c. Pergeseran Definisi Keamanan.....	23

d.	TNI dalam Tugas Operasi Militer selain Perang .....	25
----	---	----

### BAB III

	KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI PADA KETAHANAN NASIONAL.....	27
--	--	----

8.	Umum. ....	27
----	------------	----

9.	Indonesia dan Ketahanan Pangan.....	27
----	-------------------------------------	----

10.	Indonesia dan Ketahanan Energi.....	32
-----	-------------------------------------	----

11.	Peran TNI AD Hingga Saat Ini. ....	38
-----	------------------------------------	----

a.	TNI AD dan Ketahanan Pangan. ....	38
----	-----------------------------------	----

b.	TNI AD dan Ketahanan Energi. ....	46
----	-----------------------------------	----

12.	Keterlibatan Militer di Beberapa Negara dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi.....	49
-----	---	----

a.	Umum. ....	49
----	------------	----

b.	Bentuk Peran Militer Asing dalam Kebijakan Ketahanan Pangan dan Energi.....	50
----	---	----

### BAB IV

	IMPLIKASI DAN STRATEGI PERAN TNI AD .....	55
--	---	----

13.	Umum. ....	55
-----	------------	----

14	Implikasi Perubahan Definisi Keamanan terhadap Peran TNI AD pada Ketahanan Nasional.....	57
----	--	----

a.	Peran TNI AD pada Ketahanan Pangan.....	58
----	---	----

b.	Peran TNI AD pada Ketahanan Energi .....	64
15.	Langkah-Langkah Strategis. ....	68
a.	Langkah Strategis dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.....	68
b.	Langkah Strategis dalam mewujudkan Ketahanan Energi Nasional.....	81
BAB V		
PENUTUP.....		89
16.	Kesimpulan. ....	89
17.	Rekomendasi. ....	92
ALUR PIKIR.....		97
DAFTAR PUSTAKA.....		98
DAFTAR TIM POKJA KAJIAN PERAN TNI AD DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI NASIONAL.....		101





## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Umum.

a. TNI AD dimasa damai, memiliki komitmen yang kuat dalam berperan aktif membantu pemerintah untuk melaksanakan tugas pokoknya, khususnya tugas operasi militer selain perang. TNI AD selalu berupaya membantu pemerintah di bidang pembangunan dan mengakselerasi peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui fungsi Pembinaan Teritorial. Dari sisi inilah urgensi peran TNI AD dalam membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan energi dimunculkan. Tidak hanya satuan-satuan kewilayahan saja yang dapat diperankan oleh TNI AD dalam mewujudkan keinginan pemerintah ini, tetapi termasuk satuan non kewilayahan yang dimiliki TNI AD.

b. Keberadaan TNI AD yang tersebar di seluruh penjuru



nusantara menjadi potensi utama dalam mensinergikan misi utama pemerintah. Yaitu mewujudkan ketahanan pangan nasional dan lepas dari ketergantungan akan energi tak terbarukan, melalui program-program yang diinisiasi oleh TNI AD, bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait lainnya. Peran TNI AD dibutuhkan dalam rangka membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan energi bagi ketahanan nasional seutuhnya. Dari fakta penyusutan lahan pertanian dan aturan

pengelolaan yang berlaku, maka perlu penanganan yang terencana guna pencapaian ketahanan pangan nasional. Selain itu, kebutuhan akan energi yang berkelanjutan juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.

c. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 pasal 8, menyebutkan bahwa salah satu tugas TNI AD adalah, “melaksanakan pemberdayaan pertahanan di darat.” Dalam pelaksanaannya, TNI AD

melakukan segala upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dalam bentuk Pembinaan Teritorial. Pembinaan Teritorial menjadi salah satu fungsi utama TNI AD pada hakikatnya menjadi salah satu kegiatan utama dalam pencapaian tugas pokok TNI AD. Tugas tersebut bertujuan untuk memenangkan pertempuran di darat serta mengatasi kesulitan masyarakat. Dalam memenangkan pertempuran di darat, penyiapan ruang, alat dan kondisi juang menjadi modal yang mendasar. Salah satu bentuk penyiapan ruang, alat dan kondisi juang adalah dengan meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional dalam rangka pertahanan semesta.

d. TNI AD sebagai bagian dari TNI bersama institusi pemerintah dan lembaga lainnya, wajib ikut serta dalam menyuskan program tersebut. Akibatnya, mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional telah menjadi bagian dalam perencanaan Program Kerja dan Anggaran TNI AD Bidang Teritorial. Kaitannya dengan hal tersebut, efektivitas dan efisiensi peran TNI AD dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional perlu dibahas dalam bentuk kajian. Masalah-

masalah yang muncul dalam melaksanakan pembahasan kajian ini, kaitannya dengan fungsi-fungsi TNI AD adalah :

- 1) Bagaimana bentuk pengaruh ketahanan pangan dan energi dalam mewujudkan ketahanan nasional secara utuh?
  - 2) Sejauhmana urgensi peran TNI AD dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional?
- e. Peran TNI AD akan menjadi pokok pembahasan yang akan diulas dalam kajian Triwulan ini. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh TNI AD semenjak dicanangkannya program pencapaian swasembada pangan oleh Presiden melalui Panglima TNI dan Kasad. Selain itu, isu ancaman proxy war yang menyentuh kedaulatan energi juga menjadi faktor pendorong pentingnya peran TNI AD. Peran TNI AD dalam mendukung terwujudnya kedua hal tersebut, ketahanan pangan dan energi, dinilai sangat berpengaruh dalam menjaga stabilitas keamanan dalam rangka ketahanan nasional. Peran yang telah ada, dinilai masih

mengalami banyak kendala di level strategis sampai dengan teknis.

f. Proxy war di Indonesia, menurut Panglima TNI, tidak lagi menggunakan tank dan pesawat tempur atau alat-alat militer, melainkan melalui instrumen lain.<sup>1</sup> Melalui proxy war jenis ini, pelemahan dan penghancuran dilakukan melalui berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara masif dan terus-menerus, tanpa kita sadari. Sebagai contoh, peredaran narkoba, tawuran pelajar dan mahasiswa, aksi anarkisme, adu domba antar komponen bangsa, pembentukan opini dan rekayasa melalui media massa yang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan akan sumber-sumber air, pangan dan energi yang kian menipis ini semua merupakan bagian proxy war.<sup>2</sup> Kesemuanya bertujuan untuk menciptakan generasi yang tidak berkualitas (*lost generation*) dan melemahkan bangsa sehingga negara lain atau aktor non-negara mudah menguasai sumbar daya alam Indonesia yang melimpah. Jika melihat dari tren

tersebut, maka Seskoad pada triwulan keempat tahun 2015 ini akan mengupas suatu kajian dengan judul Peran TNI AD dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional.

## 2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Kajian ini dibuat untuk memberikan gambaran kepada Komando Atas tentang Peran TNI AD dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional, sekaligus sebagai sarana evaluasi peran yang selama ini telah dimainkan untuk meningkatkan efektivitas sekaligus hasil akhir peran TNI AD.

b. Tujuan. Kajian ini disusun sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan perubahan kebijakan bagi peran TNI AD guna mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional.

## 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. Ruang lingkup. Kajian ini memuat data, fakta dan analisa tentang Peran TNI AD dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional, serta saran

<sup>1</sup> Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, "Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri Sebagai Modal Membangun Menuju Indonesia Emas," Jakarta: Mabes TNI, 2015, 23-28.

<sup>2</sup> Nurmantyo, "Memahami Ancaman," 26-28.



strategis bagi pimpinan guna perumusan kebijakan TNI AD selanjutnya.

b. Tata urut. Kajian ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan.
- 2) Latar Belakang
- 3) Ketahanan Pangan dan Energi pada Ketahanan Nasional.
- 4) Implikasi dan Strategi Peran TNI AD.

5) Penutup.

#### **4. Metode dan Pendekatan.**

a. Metode. Metode kajian ini adalah metode kualitatif dengan penekanan pada deskriptif analitis, yaitu menganalisis data dan fakta dihadapkan dengan kondisi nyata.

b. Pendekatan. Pendekatan naskah ini menggunakan pendekatan observatif terhadap fakta, analisis terhadap data dilanjutkan interpretasi untuk membangun pemahaman dan wawasan.

*Indonesia merupakan  
salah satu negara  
kepulauan terbesar di  
dunia yang memiliki  
kekayaan alam yang  
cukup melimpah.*



## BAB II LATAR BELAKANG

### 5. Umum.

a. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Dari kekayaan alam yang melimpah tersebut telah dapat menggambarkan suatu wujud potensi ketahanan pangan dan energi. Sumber kekayaan alam Indonesia yang besar tersebut, sudah seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Ketahanan pangan

merupakan hal yang penting dan strategis. Pengalaman di banyak negara menunjukkan, bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu.<sup>3</sup> Hal ini juga merupakan salah satu tolok ukur kekuatan negara, karena ketahanan pangan secara tidak langsung akan meningkatkan ketahanan nasional. Demikian juga apabila ketahanan pangan lemah, maka kedaulatan dan stabilitas negara bisa terganggu.

c. Dalam beberapa tahun terakhir, lahan pertanian mengalami

<sup>3</sup> [Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.](#)



penurunan akibat pengalihan fungsi menjadi areal perumahan dan berbagai macam industri.<sup>4</sup> Seperti yang terjadi dibeberapa provinsi di Indonesia seperti Aceh, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kep. Riau dan NTB, luas lahan pertanian akibat pengalihan fungsi berkurang sebanyak 10% dari tahun 2003 s.d. 2013.<sup>5</sup>

d. Disisi lain, terwujudnya ketahanan energi nasional sangat penting bagi keberlangsungan hajat hidup bangsa Indonesia. Selain dalam rangka merespon dinamika perubahan energi global (eksternal), juga sebagai langkah

kemandirian untuk menjamin ketersediaan energi dalam negeri (internal). Sistem ketahanan energi saat ini, mengacu pada kebijakan pengembangan energi sesuai Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007. Kebijakan tersebut mengatakan bahwa energi berperan sebagai sarana peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. Jika dilihat dari data tahun 2011 s.d. 2013, telah terjadi penurunan ekspor minyak mentah dan hasil minyak serta naiknya impor dari kedua sumber energi tersebut.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan bangsa akan energi tak terbarukan sangat tinggi

4 Komunika Vol.10, No. 2, 2007:45-49.

5 Biro Pusat Statistik, *Rata-rata Luas Lahan Pertanian tahun 2003-2013*, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses pada tanggal 28 Oktober 2015.



serta ketidak mampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan nasional tersebut. Melihat hal tersebut diatas, berkurangnya ketergantungan akan energi tak terbarukan dan pemanfaatan energi terbarukan, tentunya akan meningkatkan ketahanan nasional secara umum. Karena dengan peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan akan mengurangi ketergantungan bangsa dari bangsa lain pula. Dari sudut inilah peran TNI AD menjadi penting.

Untuk mencapai tujuan tersebut, energi nasional harus dikelola untuk kepentingan keamanan dan kesejahteraan bangsa. Hal ini mengandung arti bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah air Indonesia harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Didalam aturan perundangan ini diatur tentang segala hal yang berkaitan dengan pangan. Didalam aturan perundangan ini pula disebutkan tentang hubungan antara ketahanan nasional dan ketahanan pangan yang sangat berkaitan dengan stabilitas nasional. Seperti yang tercantum dalam pasal 1, ayat 4 yaitu:

## 6. Landasan.

- a. Landasan Yuridis.
  - 1) UUD 1945 pasal 33. Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum.<sup>7</sup>

7

Pembukaan UUD 1945, alinea 4.

“Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.”

Ayat tersebut diatas juga menjelaskan tentang makna ketahanan pangan yang mengandung beberapa aspek seperti ketersediaan, keberagaman, keamanan, pemerataan, akses dan kelayakan serta keberlanjutannya. Aspek-aspek tersebut tentunya sangat berkaitan erat dengan tugas pokok TNI-dan TNI AD khususnya-dalam menjaga integritas dan kedaulatan NKRI.

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Peranan petani sangatlah sentral dalam mewujudkan ketahanan pangan guna mewujudkan ketahanan nasional. Yang patut menjadi pokok perhatian adalah aturan perundangan ini belum menyebutkan hubungan yang

erat antara pentingnya petani dan pertanian dengan ketahanan nasional. Untuk itu perlu suatu aturan pelaksana yang nantinya lebih dapat menyentuh pokok bahasan ketahanan nasional.

4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Peranan energi sangat penting bagi kegiatan perekonomian dan ketahanan nasional. Secara umum undang-undang ini berisi tentang: pengaturan energi yang terdiri dari penguasaan dan pengaturan SDE; cadangan penyanga energi guna menjamin ketahanan energi nasional; keadaan krisis dan darurat energi serta harga energi; dan kewenangan pemerintah dalam pengaturan energi; kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional, dan pembentukan dewan energi nasional; hak dan peran masyarakat; pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan; dan penelitian dan pengembangan.

5) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada

pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Minyak dan gas bumi merupakan SDA strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Kekayaan nasional tersebut dikuasai oleh negara,<sup>8</sup> sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 8, menyebutkan bahwa salah satu tugas TNI AD pada Operasi Militer Selain Perang adalah, “melaksanakan pemberdayaan pertahanan di darat.” Dalam pelaksanaannya, TNI AD melakukan segala upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dalam bentuk Pembinaan Teritorial. Pembinaan Teritorial menjadi salah satu fungsi utama TNI AD pada hakikatnya menjadi salah satu kegiatan utama dalam pencapaian tugas pokok TNI AD.

b. Landasan Operasional.

1) Permenhan Nomor

Per/03/M/II/2008 tentang Buku Putih Pertahanan RI 2008. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara dapat datang dari luar maupun timbul di dalam negeri.

Isu-isu keamanan energi global dalam dekade terakhir ini semakin mengemuka dan berdampak terhadap lingkungan strategis. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan masyarakat dunia akan energi dan pangan yang terus meningkat, sementara ketersediaannya semakin terbatas.

Aspek ekonomi dalam kerangka pertahanan negara memiliki peran vital. Ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup tinggi akan memungkinkan terselenggaranya pembangunan pertahanan yang berdaya tangkal. Kondisi perekonomian nasional yang cukup tinggi tersebut bahkan menjadi daya tangkal pertahanan yang cukup efektif.

<sup>8</sup> UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pasal 4, ayat (1).



2) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Penggunaan Kekuatan TNI. Dalam Peraturan Menteri ini dituangkan tentang latar belakang dan landasan penggunaan kekuatan TNI dalam tugas Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Di dalam peraturan ini pula disebutkan tentang aturan penggunaan kekuatan TNI dalam hal menghadapi ancaman nirlimiliter termasuk didalamnya dalam rangka mengamankan kepentingan nasional di bidang sumber daya alam.

3) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. Didalam aturan ini disebutkan tentang beberapa pokok-pokok kebijakan yang berkaitan tentang pentingnya pemberdayaan sumber daya nasional dalam rangka pertahanan. Sumber daya yang dimaksud salah satunya adalah sumber daya alam yang dapat digunakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan kepentingan pertahanan.

4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan. Partisipasi

pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan penyediaan dan pemanfaatan EBT. Untuk mendorong kegiatan tersebut, pemerintah harus melaksanakan kegiatan fisik pemanfaatan EBT sebagaimana diatur oleh Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2012. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.<sup>9</sup>

5) Perjanjian Kerjasama Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI dengan Aster Kasad Nomor 06/SR.120/b.1/01/2015 tanggal 2 Januari 2015. Perjanjian kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) berupa petunjuk pelaksanaan yang memuat kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang bersifat teknis, sesuai dengan tingkatannya, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

### c. Landasan Teori.

1) Teori Peran. Berkaitan dengan peran TNI AD dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional, maka peran TNI AD didasarkan pada para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Robert Linton (1936), menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seseorang yang mempunyai peran tertentu seperti; dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya memiliki perilaku sesuai dengan peran tersebut.

Peranan menurut (Coser & Rosenberg, 1976: 232-255; 294) diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya), didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi.

---

<sup>9</sup> Permen ESDM No. 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBT, Pasal 2.

Peranan menurut Soerjono Soekanto, 1981: 221, selain ditentukan oleh pelaku peran, juga ditentukan oleh harapan pihak lain, termasuk kemampuan, keahlian, serta kepekaan pelaku terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan.

Teori peran sangat berkaitan erat dengan sosialisasi. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory). Walau Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku personel dalam hubungannya dengan peran TNI AD, namun jauh sebelumnya Robert Linton (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya. Kemanungan TNI Rakyat pada dasarnya adalah merupakan wujud interaksi sosial antara TNI AD dengan rakyat yang terbangun melalui pembinaan teritorial (budaya interaksi TNI AD).

## 2) Teori Keamanan.

Walter Lippmann merangkum kecenderungan konsep tradisional tentang keamanan dengan

pernyataannya yang terkenal,

*“suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (vital) .., dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang.”*

<sup>10</sup>

Dalam konsep-konsep tradisional, para ilmuwan biasanya menafsirkan keamanan yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan - sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar.

Diskursus kontemporer yang memberikan definisi keamanan secara fungsional dan longgar memasukkan unsur dan perspektif yang tidak terdapat dalam diskursus tradisional. Bagi Caroline Thomas dan Jessica Mathews, misalnya, keamanan bukan hanya berkaitan dengan nexus military-external tetapi juga menyangkut dimensi-

---

<sup>10</sup> Walter Lippman, “US Foreign Policy: Shield of the Republic,” An Atlantic Monthly Press Book, (Little Brown and Company: Boston, 1943), 31.



dimensi lain. Keamanan, menurut Thomas dan Mathews, bukan hanya terbatas pada dimensi militer, seperti sering diasumsikan dalam diskusi tentang konsep keamanan, tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara, (termasuk di dalamnya) upaya memantapkan keamanan internal melalui bina-bangsa, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, uang, dan perdagangan, maupun melalui pengembangan senjata nuklir.<sup>11</sup>

Istilah-istilah yang kemudian muncul misalnya keamanan lingkungan (environmental security), keamanan pangan (food

security), keamanan energi (energy security), dan keamanan ekonomi (economic security) menunjukkan bahwa suatu entitas sosial dan/atau politik dapat menghadapi ancaman di berbagai bidang kehidupannya.<sup>12</sup>

Tentu, ancaman itu dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Belakangan muncul berbagai terminologi; misalnya ancaman transnasional (lintas nasional) sebagai ancaman yang berasal dari luar negara dan bergema di dalam suatu negara. Pada prinsipnya, ancaman ini berasal dari luar tapal batas tetapi dapat menimbulkan masalah-masalah serius di dalam wilayah nasional suatu negara. Mereka dapat mengancam komponen keamanan seperti yang diidentifikasi sebelumnya landasan

11 Jessica Matthews, "The Ethics and Politics of Asylums: Liberal Democracy and the Response of Refugee," in Gil Loescher and James Milner, "*Protracted Refugee Situations: Domestic and International Security Implications*," Routledge Taylor and Francis Group, (London and New York: 2007), 16.

12 Anggoro, "Keamanan Nasional," 4.

fisik, landasan ideal dan landasan institusional.

3) Teori Energi. Teori ini dikemukakan oleh Marion King Hubbert (1956), seorang geofisikawan Amerika Serikat. Hubbert menggambarkan sebuah model untuk mengestimasi puncak dari produksi minyak dunia dalam sebuah kurva yang dikenal Hubbert Curve. Berdasarkan pengamatan terhadap data-data Migas di negara bagian AS, Hubbert tepat memprediksikan produksi minyak AS akan menurun pada dekade 1970-an.<sup>13</sup> Sumur-sumur di sebuah ladang migas yang berproduksi secara bersamaan, akan memiliki grafik terhadap waktu yang berbentuk seperti lonceng. Situasi tersebut berarti bahwa produksi ladang tersebut akan mencapai sebuah puncak untuk kemudian menurun dengan tingkat yang sama seperti kenaikan produksinya.

## 7. Dasar Pemikiran.

a. Kondisi Global dan Regional Asia Pasifik

Lingkungan strategis menyangkut

<sup>13</sup> “Reinterpretasi Kenaikan Harga BBM”, Harian Indo Progress, Edisi 28 Juli 2008. Diakses dari <http://indoprogress.com/2008/07/reinterpretasi-kenaikan-harga-bbm/> pada tanggal 6 Oktober 2015.

sumber daya alam di tingkat global tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan sosial, ekonomi, bahkan keamanan. Terus bertambahnya jumlah penduduk dunia serta tuntutan pertumbuhan ekonomi telah mendorong meningkatnya konsumsi energi dunia. Tingkat pertambahan penduduk serta pertumbuhan ekonomi memang tidak merata. Negara-negara industri maju, dalam lima tahun terakhir dan bahkan dalam dua dekade terakhir, umumnya mengalami pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil pada tingkat yang ‘matang’ dan relatif kecil. Beberapa negara bahkan mengalami pertumbuhan negatif.

Kebutuhan energi dunia masih banyak mengandalkan energi yang bersumber dari bahan bakar fosil, bahkan minyak bumi masih akan mendominasi bauran energi primer dunia hingga tahun 2050.<sup>14</sup> International Energy Agency (IEA) memperkirakan permintaan energi global akan meningkat sebesar 45% pada tahun 2030. Rata-rata mengalami peningkatan

<sup>14</sup> “Hingga Tahun 2050 Minyak Bumi Masih Mendominasi Bauran Energi Primer,” Majalah ESDMMAG, Edisi 09, 2012.



permintaan sebesar 1,6% per tahun, sedangkan sekitar 80% kebutuhan energi dunia dipasok dari bahan bakar fosil.<sup>15</sup>

Dalam jangka panjang, dengan jumlah penduduk dunia sekitar 10 miliar orang pada tahun 2100, konsumsi energi diperkirakan akan mencapai setidaknya sekitar 100 miliar barel setara minyak per tahun, atau sekitar 275 juta barel setara minyak per hari. Komposisi bauran energi dunia yang saat ini didominasi oleh sumber energi fosil yakni minyak, gas dan batubara akan terus berlanjut meskipun seluruh dunia sudah berusaha keras untuk mengembangkan sumber-sumber energi alternatif non-minyak.

Hingga saat ini, energi alternatif  
*Ibid.*

masih belum mampu menggantikan energi fosil secara signifikan, baik dari segi biaya maupun dari segi kepraktisan. Setidaknya, hingga tahun 2030 peran energi fosil diperkirakan masih sekitar 75 persen dari total konsumsi energi dunia. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi terjadi di negara-negara berkembang yang mempunyai kapasitas untuk tumbuh. Faktor penentunya, antara lain, jumlah penduduk sebagai pasar dalam negeri yang besar, luas wilayah, kekayaan sumber daya alam yang menjadi modal dasar pembangunan, sistem sosial politik dan keamanan yang relatif stabil, dan mutu sumber daya manusianya.

Pemanfaatan dan penggunaan sumber energi dari bahan bakar

fosil dieksplorasi terus-menerus secara alamiah sehingga jumlahnya menjadi semakin berkurang dan terbatas. Ketersediaan energi fosil dunia diperkirakan mampu bertahan memenuhi kebutuhan energi dalam jangka waktu yang tidak lama. Minyak bumi mampu mencukupi kebutuhan energi dunia sampai 42 tahun, sedangkan gas alam cair bertahan hingga 62 tahun ke depan.<sup>16</sup> Ketersediaan tersebut berpengaruh terhadap jumlah produksi energi yang semakin menurun dihadapkan pada permintaan kebutuhan yang semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan harga energi menjadi mahal dan tidak ekonomis. Kondisi ketidakseimbangan antara kebutuhan (demand) energi dengan ketersediaan (supply) selanjutnya menyebabkan krisis energi seperti yang dialami saat ini.<sup>17</sup>

***Minyak bumi  
mampu mencukupi  
kebutuhan energi  
dunia sampai 42  
tahun, sedangkan gas  
alam cair bertahan  
hingga 62 tahun ke  
depan***

Setidaknya dalam dua dekade terakhir ini, Tiongkok tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ditambah dengan Korea dan Taiwan serta Jepang yang memang sudah maju menjadi negara industri sebelumnya, menempatkan kawasan Asia Timur menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia yang berarti juga memiliki kebutuhan energi yang sangat besar. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya, negara-negara itu berupaya untuk mengamankan pasokan energi dan sumber daya mineralnya. Secara alamiah mereka harus mengimpornya karena keterbatasan bahkan nihilnya potensi cadangan sumber daya alam berupa energi dan bahan mineral.

Tiongkok sebenarnya juga penghasil minyak bumi dan gas. Namun karena kebutuhannya jauh di atas produksi dalam negeri, maka Tiongkok melalui BUMN migasnya secara gencar melakukan ekspansi pencarian cadangan di luar negaranya, untuk memperkuat ketahanan energi migasnya.

<sup>16</sup> “Cadangan Uranium Dunia Cukup Sampai 3.600 Tahun Mendatang,” Universitas Gadjah Mada, 3 Desember 2012. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/4749-cadangan.uranium.dunia.cukup.sampai.3600.tahun.mendatang>, pada tanggal 20 Mei 2015.

<sup>17</sup> Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian ESDM, *Kajian Supply*

Sebagai negara yang secara geologis mengandung potensi kekayaan sumber daya alam yang besar dan memiliki jarak yang relatif dekat, Indonesia dijadikan sebagai sumber pemasok energi dan bahan-bahan mineral mereka.

Tiongkok yang juga merupakan salah satu pemilik cadangan batubara terbesar di dunia, dengan sangat sadar memilih untuk mengimpor batubara sebanyak mungkin dari Indonesia. Selain itu, mereka juga mendatangkan energi dari kawasan Timur Tengah, Afrika Barat dan Australia. Dampak dari kebutuhan besar Tiongkok terhadap sumber-sumber energi adalah sengketa wilayah dengan negara-negara sekitar, menyangkut kawasan yang diperkirakan juga kaya dengan sumber energi.

Aspek sumber daya alam yang diperebutkan bukan semata terkait energi, melainkan juga lahan-lahan pertanian dengan pendekatan akuisisi atau sewa jangka panjang. Sebuah praktik yang dicurigai sebagai land grab atau kolonialisme gaya baru. Studi oleh Borras Jr et.al (2012) mengungkapkan bahwa pangan hanyalah sebagian saja dari motif mengapa negara-negara yang

sebenarnya kaya secara ekonomi memilih untuk beramai-ramai melakukan akuisisi dan sewa lahan di negara-negara lain.

Terdapat alasan lain yang mendasarinya tidak diubah seperti investasi biofuel, bagian dari strategi mengantisipasi perubahan iklim, dan untuk mencari sumber baru dalam memperkuat jalur arus modal di dunia yang semakin mengglobal. Tiongkok banyak melakukan praktik tersebut, baik di Afrika, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin. Sejumlah negara lain seperti Australia, Korea Selatan juga melakukan hal yang sama. Begitu pula Malaysia, termasuk melalui perkebunan kelapa sawitnya di lahan-lahan di Indonesia.

Sementara itu, Amerika Serikat juga mempunyai hubungan rumit dengan Tiongkok. Secara politik Amerika Serikat masih berhadapan dengan Tiongkok yang dipandang banyak melakukan praktik pelanggaran HAM. Amerika Serikat terus tampil di depan dalam urusan HAM. Selain itu Amerika Serikat juga mendukung Taiwan serta Jepang dari kemungkinan mendapat serangan militer Tiongkok. Meskipun demikian,



Amerika Serikat dan Tiongkok terlibat dalam hubungan ekonomi yang rumit, yang pada satu sisi saling berhadapan, namun di sisi lain saling membutuhkan.

Tiongkok merupakan pembeli terbesar obligasi Amerika Serikat yang berarti juga ‘pemberi pinjaman’ terbesar bagi negara adidaya tersebut. Dengan demikian, Tiongkok tentu berharap perekonomian Amerika-selain bergantung pada Tiongkok-juga dapat tumbuh sehingga mampu membayar pinjamannya. Di sisi lain, Tiongkok juga mengharap para investor Amerika menanamkan modalnya untuk menguatkan usaha di Tiongkok.

Hubungan rumit tersebut terlihat dalam hubungan antarnegara ‘elite’ dalam tatanan global, seperti lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan delapan negara yang biasa berkumpul

menentukan agenda ekonomi dunia (G-8). Dalam forum tersebut masing-masing negara cenderung berkeras mempertahankan kepentingan masing-masing dengan mengabaikan kepentingan bersama global. Lemahnya mekanisme dan skema kerja sama multilateral seperti PBB dan WTO, terbukti dengan tidak terselesaikannya banyak persoalan. Misalnya, persoalan ketegangan di Timur Tengah, masalah tindak lanjut untuk isu perubahan iklim, hingga kebuntuan negosiasi terkait perdagangan.

Terbentuknya forum seperti G-20, APEC serta forum kerja sama ekonomi yang tumpang tindih di satu kawasan, menunjukkan bahwa relasi antarnegara berpotensi rumit. Pada tingkat tertentu terdapat kesadaran bersama untuk membangun tata kelola global (global governance) serta bangunan bersama global



(global architecture). Kesadaran tersebut adalah untuk membangun norma global yang menginginkan penjagaan perdamaian dunia. Meskipun demikian, jalan untuk mewujudkan bangunan global yang damai tersebut tidak sederhana. Harapan besar untuk membangun dunia yang aman, damai, dan sejahtera itu acapkali berbenturan keperluan pendek untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing.

b. Kondisi Nasional.

Ketersediaan energi merupakan faktor yang menentukan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Mantan Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono menyampaikan bahwa terdapat tiga faktor yang semakin langka dan berpotensi menjadi konflik internasional di kemudian hari. Faktor tersebut adalah ketersediaan pangan, ketersediaan energi, dan ketersediaan air.<sup>18</sup> Terjadinya kelangkaan atau krisis energi merupakan isu global yang memiliki dampak luas terhadap sektor lainnya. Krisis tersebut dapat mengganggu fungsi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan/atau kegiatan perekonomian.<sup>19</sup> Bentuk nyata krisis adalah hambatan yang besar atau kenaikan harga dalam

18 Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Musrenbangnas, Jakarta, 12 Mei 2004.

19 UU RI No. 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 6, ayat (3).

penyediaan sumber daya energi ke sektor ekonomi.

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber kekayaan alam, belum memanfaatkan secara maksimal. Eksplorasi sumber energi belum dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.<sup>20</sup> Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut tercermin dalam situasi ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir ini. Sejak oil booming atau puncak produksi minyak nasional terjadi pada tahun 1977,<sup>21</sup> pertumbuhan ekonomi nasional mengalami pasang surut disebabkan krisis energi. Indonesia memiliki ketergantungan pada sektor Migas, dan diperkirakan hingga tahun 2025 sektor Migas masih mendominasi penggunaan energi nasional.<sup>22</sup>

Indonesia mengimpor BBM sejak tahun 2004 untuk memenuhi permintaan energi dalam negeri,<sup>23</sup> termasuk

20 Gde Pradyana, *Op.Cit.*, hlm. 46.

21 *Ibid*, hlm 146.

22 Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D., Menteri ESDM (2000–2009), disampaikan pada acara Inspiring Talk dengan tema, "Mampukah Sektor Migas Berkontribusi Menuju Kemandirian Energi Nasional?" yang diselenggarakan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) pada tanggal 23 April 2009.

23 Pusat data dan Teknologi Informasi, Ke-

permintaan kebutuhan LPG yang semakin bertambah. Bertambahnya permintaan dan kelangkaan ketersedian energi mendorong kondisi ekonomi memburuk. Hal itu ditambah dengan kenaikan harga energi seperti harga minyak global semakin naik karena perkembangan geopolitik dunia. Kondisi ekonomi tersebut diiringi dengan kenaikan barang kebutuhan bahan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat.<sup>24</sup> Indikator inflasi ini terjadi pada beberapa tahun belakang ini disebabkan kenaikan harga BBM dan tarif tenaga listrik (TTL) yang diikuti oleh kenaikan bahan pangan.<sup>25</sup> Situasi ini cukup memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi nasional. Modus kejahatan penimbunan BBM cukup marak terjadi pada situasi ekonomi seperti ini karena dorongan motif ekonomi pelaku tindak kejahatan.

---

menterian ESDM, *Analisis Data Strategis ESDM Untuk Mendukung Kajian Review Kebijakan Sektor Energi*, *Op.Cit.*, hlm. 31

24 Bank Indonesia, "Inflasi." Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/> moneter/in\_asi/pengenalan/Contents/Default.aspx, pada tanggal 25 Mei 2015.

25 "BPS: Inflasi 2014 Capai 8,36 Persen," *Kompas.com*, 2 Januari 2015. Diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/02/102923526/BPS.Inflasi.2014.Capai.8.36.Persen>, pada tanggal 25 Mei 2015.

c Pergeseran Def nisi  
Keamanan.

Berdasarkan berbagai literatur, keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.<sup>26</sup> Kepentingan nasional kemudian menjadi faktor dominan dalam konsep keamanan nasional suatu bangsa. Keamanan nasional juga bisa diartikan sebagai kebutuhan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi negara melalui kekuatan ekonomi, militer dan politik serta pengembangan diplomasi. Konsep ini menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman yang datang dari luar dan dari dalam negara tersebut.

Beberapa langkah yang penting dalam penyelenggaraan keamanan nasional mencakup penggunaan diplomasi untuk menggalang sekutu dan mengisolasi ancaman,

penataan angkatan bersenjata yang efektif, implementasi konsep pertahanan sipil dan kesiagaan dalam menghadapi situasi darurat, termasuk terorisme.<sup>27</sup> Bersamaan dengan itu, negara memastikan kemampuan daya dukung dan ketersediaan infrastruktur vital di dalam negeri, penggunaan kekuatan intelijen untuk mendeteksi dan mengalahkan atau menghindari berbagai ancaman dan spionase, serta melindungi informasi rahasia negara, dan penggunaan kekuatan kontra-intelijen untuk melindungi negara. Kesemua ini menunjukkan bahwa keamanan hanya berorientasi pada keamanan negara.

Sampai dengan masa Perang Dunia II, def nisi keamanan terkait erat dengan kekuatan militer.<sup>28</sup> Agar negara aman, kemampuan militer yang kuat harus dimiliki, atau bersekutu dengan negara lain yang memiliki kekuatan angkatan bersenjata yang besar. Berakhirnya perang dingin dan proses globalisasi telah membawa perubahan terhadap def nsi keamanan yang merujuk pada ancaman ekspansif yang diakibatkan oleh

<sup>27</sup> Setjen Wantannas, "Keamanan Nasional," 14.

<sup>28</sup> Setjen Wantannas, "Keamanan Nasional," 11.

<sup>26</sup> Setjen Wantannas, "Keamanan Nasional," 13.



kerusakan lingkungan, penyebaran penyakit, dan ancaman dari aktor-aktor nonnegara. Pada saat yang bersamaan perkembangan ilmu hubungan internasional melahirkan pandangan baru konsep keamanan yang tidak hanya meliputi aspek militer dan melibatkan aktor keamanan semata-mata. Konsep keamanan non-konvensional ini memiliki definisi yang lebih fungsional, mencakup aspek nonmiliter, dan melibatkan aktor nonpemerintah.

Perubahan konsep dan fokus keamanan tersebut di atas berlangsung secara cepat selama dua dekade terakhir, sehingga ada seorang ahli yang berkata bahwa saat ini tengah berlangsung revolusi

paradigma keamanan (revolution in the nature of security).<sup>29</sup> Perubahan itu tidak diakibatkan oleh terjadinya perubahan politik internasional atau oleh peristiwa keamanan tertentu, seperti berakhirnya Perang Dingin dan peristiwa serangan teroris di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa-peristiwa tersebut bukan penyebab, tetapi hanya merupakan batu-batu penanda (milestones) dilakukannya perubahan kebijakan dan strategi keamanan suatu negara. Alasan terjadinya perubahan paradigma keamanan adalah jauh lebih fundamental, yakni bergeser atau berubahnya tata kehidupan umat manusia sebagai akibat dari loncatan kemajuan ilmu

<sup>29</sup> Setjen Wantannas, "Keamanan Nasional," 16.



pengetahuan dan teknologi yang telah semakin mendorong proses globalisasi setiap aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Untuk itu maka berkembang konsep keamanan baru yang disebut keamanan komprehensif (comprehensive security). Berdasarkan kesadaran bahwa keamanan adalah kepentingan semua pihak dan ancaman selalu bersifat multidimensional, maka konsep keamanan komprehensif berupaya menciptakan stabilitas keamanan secara damai melalui keterpaduan komprehensif semua upaya di segala aspek kehidupan.

d. TNI dalam Tugas Operasi Militer selain Perang.

TNI AD di masa damai, memiliki komitmen yang kuat dalam berperan aktif membantu pemerintah untuk melaksanakan tugas pokoknya, khususnya tugas operasi militer selain perang. TNI AD selalu berupaya membantu pemerintah di bidang pembangunan dan mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi Pembinaan Teritorial. Dari sisi inilah urgensi peran TNI AD dalam membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan energi dimunculkan. Tidak hanya satuan-satuan teritorial saja yang dapat diperankan oleh TNI

AD dalam mewujudkan keinginan pemerintah ini.

Keberadaan TNI AD yang tersebar di seluruh penjuru nusantara menjadi potensi utama dalam mensinergikan misi utama pemerintah. Yaitu mewujudkan ketahanan pangan nasional dan lepas dari ketergantungan akan energi tak terbarukan, melalui program-program yang diinisiasi oleh TNI AD, bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait lainnya. Peran TNI AD dibutuhkan dalam rangka membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan bagi ketahanan nasional seutuhnya. Dari fakta penyusutan lahan pertanian dan aturan pengelolaan yang berlaku, maka perlu penanganan yang terencana guna pencapaian ketahanan pangan nasional. Selain kebutuhan akan ketahanan pangan, kebutuhan akan energi yang berkelanjutan juga menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 pasal 8, menyebutkan bahwa salah satu tugas TNI AD adalah, “melaksanakan pemberdayaan pertahanan di darat.” Dalam

pelaksanaannya, TNI AD melakukan segala upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dalam bentuk Pembinaan Teritorial. Pembinaan Teritorial menjadi salah satu fungsi utama TNI AD pada hakikatnya menjadi salah satu kegiatan utama dalam pencapaian tugas pokok TNI AD. Tugas tersebut bertujuan untuk memenangkan pertempuran di darat serta mengatasi kesulitan masyarakat. Dalam memenangkan pertempuran di darat, penyiapan ruang, alat dan kondisi juang menjadi modal yang mendasar. Salah satu bentuk penyiapan ruang, alat dan kondisi juang adalah dengan meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional dalam rangka pertahanan semesta.



## **BAB III** **KETAHANAN PANGAN DAN** **ENERGI PADA KETAHANAN** **NASIONAL**

### **8. Umum.**

Dengan bergeraknya definisi ketahanan yang dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis maka arti penting ketahanan pangan dan energi nasional menjadi lebih dinamis. Ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional akan kian meluas dampaknya. Oleh karena itu, TNI sebagai pemangku kepentingan dalam pencapaian stabilitas bangsa menjadi semakin

perlu berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan nasional.

### **9. Indonesia dan Ketahanan Pangan.**

Dua dekade lalu, Indonesia pernah merasakan nikmatnya swasembada beras. Namun masa-masa keemasan itu perlahan-lahan menjadi pudar dan kini Indonesia sebagai negara agraris harus mengimpor bahan pangan dari negara-negara lain. Sejarah mencatat Indonesia pernah mengalami masa swasembada pangan, khususnya beras, pada dekade 1980-an. Bahkan saat itu, Organisasi Pangan Dunia, FAO memberikan penghargaan istimewa



kepada pemerintah atas prestasi luar biasa tersebut. Namun, bertahun-tahun sesudahnya, prestasi swasembada beras tersebut nampaknya sulit untuk diulangi.

Berkaitan dengan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla, dan demi suksesnya program tersebut, maka kita perlu pelajari bagaimana cara kerja Pemerintahan pada dekade 80-an dalam membangun swasembada pangan/ beras. Pada saat itu, pemerintah memahami bahwa kurangnya stok beras dapat memicu keresahan sosial. Hal ini terjadi karena beras

selalu menjadi barometer tidak resmi bagi kesejahteraan rakyat di Indonesia. Selain itu, beras adalah salah satu isu kunci dalam agenda Pemerintah. Perubahan stok beras memiliki kaitan sangat erat dengan inflasi. Hal ini dapat dilihat saat terjadi permintaan beras yang meningkat, maka harga sembako pun akan melambung yang diikuti oleh harga barang lainnya. Kondisi seperti itu, sangat sering dimanfaatkan oleh para spekulatur yang memanfaatkan kurangnya stok beras sebagai dalih untuk menimbun dan mengambil keuntungan. Rangkaian sebab akibat inilah yang pada akhirnya

mengakibatkan keresahan publik. Sehingga skenario terburuk dari rentetan kejadian tersebut adalah munculnya kerusuhan sosial. Keresahan sosial inilah yang akan mengancam stabilitas keamanan negara.

Pada tahun 1967, pemerintah menetapkan strategi kebijakan dengan memprioritaskan kecukupan stok beras nasional. Kebijakan pertanian benar-benar difokuskan pada pencapaian swasembada beras. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah menetapkan beberapa program untuk meningkatkan produktivitas produksi beras sebagai berikut:

a. Mengembangkan benih baru dan memperkenalkan teknik baru dalam menanam. Pemerintah mengerahkan para sarjana dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor untuk hidup bersama petani. Mereka bekerja dengan penuh dedikasi sebagai penyuluh pertanian di desa-desa. Program ini dilakukan secara nasional dan terbukti sangat efektif. Pada 1970, diperkenalkanlah benih baru padi yang disebut Padi Baru 5 dan 8. Varietas unggul ini terbukti lebih tahan terhadap penyakit daripada

varietas yang biasa ditanam oleh petani.

b. Penggagasan Bimbingan Massal (Bimas) untuk merehabilitasi sistem irigasi, pendanaan untuk pupuk dan pestisida. Bimas memberi kredit modal kerja kepada petani, begitupun dengan Instruksi Massal (Inmas). Program ini bertujuan untuk memberi arahan kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan modal kerja tersebut.

Semua program tersebut pada akhirnya membuat Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Selama periode 1965 sampai dengan 1969, Indonesia hanya mampu memproduksi 1,25 ton beras per hektar. Dibandingkan dengan hasil pada tahun 1970-an, pemerintah berhasil menggandakan produksi hingga 3-4 ton beras per hektar.<sup>30</sup>

Selain persoalan produksi beras yang tertangani dengan baik, keseimbangan harga pun juga diperhatikan sebagai salah satu strategi pencapaian

---

<sup>30</sup> Retnowati Abdulgani-Knapp, "Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President," Marshall Cavendish, (Singapore:2007), 123.



swasembada. Bentuk dari upaya menyeimbangkan harga yaitu dengan menciptakan badan pangan nasional yang kemudian dikenal dengan nama Badan Urusan Logistik (Bulog) pada tahun 1967. Pada awal pembentukannya, Bulog bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua institusi yang bertanggung jawab dalam hal suplai dan distribusi komoditas penting, seperti beras.

Pada tahun-tahun berikutnya, struktur organisasi Bulog kemudian disesuaikan dengan tugas barunya sebagai pengelola cadangan pangan dalam rangka mendukung upaya nasional untuk meningkatkan produksi pangan. Pada 1971 tugas tanggung jawab Bulog diperluas dan ditunjuk sebagai importir tunggal gula pasir dan gandum dan distributor gula pasir serta tepung terigu. Tahun-tahun berikutnya,

tanggungjawab Bulog diperluas lagi sebagai pengelola beberapa komoditi pangan seperti daging, kedelai, jagung, dan kacang tanah. Bulog merupakan gabungan dari dua wilayah usaha, yakni distribusi pangan yang ditangani Badan Pelaksana Urusan Pangan dan Koordinasi Logistik Nasional yang ditangani oleh Komando Logistik Nasional (Kolognas). Penelitian Eric Dodge dan Sinaf keh Gemessa dari Harvard University, Amerika Serikat, dalam “Food Security and Rice Price Stabilization in Indonesia: Analysis of Policy Responses”, menyebutkan bahwa stabilitas harga beras domestik berhasil dipertahankan pada periode 1969-1995 meskipun harga beras dunia mengalami guncangan.

Pada masa pemerintahan itu juga dikembangkan institusi-institusi yang mendukung pertanian.



Beberapa institusi tersebut adalah koperasi yang melayani kebutuhan pokok petani dalam usaha agribisnisnya, Bulog yang menampung hasil dari petani, serta institusi penelitian. Balai Penelitian Teknologi Pertanian (BPTP) bekerja untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian. Salah satu produk yang cukup terkenal adalah Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW). Selain itu, dilaksanakannya berbagai bentuk kerjasama antar lembaga yang terkait penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian seperti irigasi dan pembangunan pabrik pupuk juga menjadi langkah lanjutan dalam program ini.

Penyediaan sarana penunjang seperti pupuk, dilaksanakan dengan cara membangun pabrik-pabrik

pupuk. Bahkan, para petani dimodali dengan kemudahan memperoleh kredit bank. Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan. Diperkenalkannya pula manajemen usaha tani, mulai dari Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi Khusus, dan Intensif kasi Khusus, terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Saat itu, budidaya padi di Indonesia adalah yang terbaik di Asia.

Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk pun dibangun, seperti Petro Kimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asean Aceh Fertilizer di Aceh.

Teknologi pertanian diperkenalkan dan disebarluaskan kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan para penyuluhan pertanian di tingkat desa dan kelompok petani. Selain program penyuluhan, kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa), juga menjadi salah satu program pertanian yang khas, karena menyuguhkan temu wicara langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau Presiden secara langsung. Kelompencapir juga menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat pertanian yang diikuti oleh para petani berprestasi dari berbagai daerah.

Indonesia yang dikenal sebagai negara agraria pengimpor beras terbesar pada tahun 1966, mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri melalui swasembada beras pada 1984. Pada 1969 Indonesia memproduksi beras sekitar 12,2 juta ton, sementara pada 1984 produksi beras Indonesia mencapai 25,8 juta ton.

## 10. Indonesia dan Ketahanan Energi.

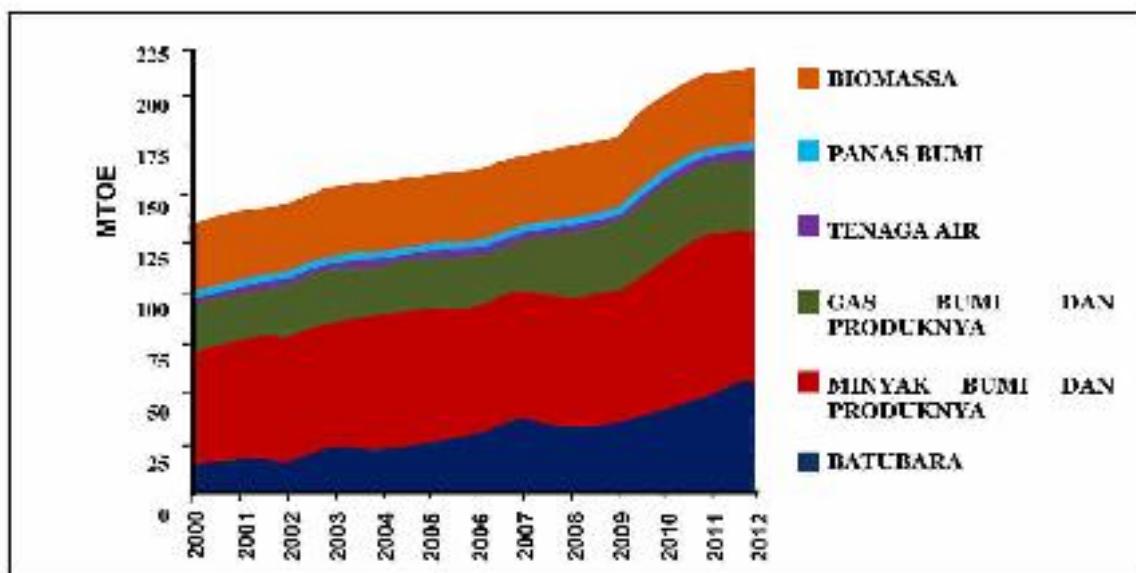
Dalam hal ketahanan energi,

kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri saat ini meningkat cukup tinggi dan mendesak untuk segera disediakan. Konsumsi energi nasional ditopang oleh bauran energi (energy mix) dari dalam maupun dari luar negeri, mengingat Indonesia telah melakukan impor BBM sejak tahun 2004.<sup>31</sup> Total pasokan energi menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 2,6% per tahun, yaitu dari sekitar 146,5 MTOE (Million Tonnes of Oil Equivalent) tahun 2002 menjadi sebesar 210,6 MTOE tahun 2012. Komposisi bauran energi primer di tahun 2012 adalah minyak bumi sebesar 36,2%; biomasa 25,3%; gas bumi 16,4%; batubara 13,5%; panas bumi 7,6%; dan tenaga air 0,5%. Total kontribusi energi fosil sebesar 66,1%, sedangkan sisanya dari EBT.<sup>32</sup>

31 Pusat Data dan Teknologi Informasi, "Analisis Data Strategis ESDM Untuk Mendukung Kajian Review Kebijakan Sektor Energi," Jakarta: Kementerian ESDM, 2013, 31.

32 Pusat Data dan Teknologi Informasi, "Analisis Data Strategis ESDM," 22.

## TOTAL PASOKAN ENERGI PRIMER



Sumber : Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian ESDM<sup>33</sup>

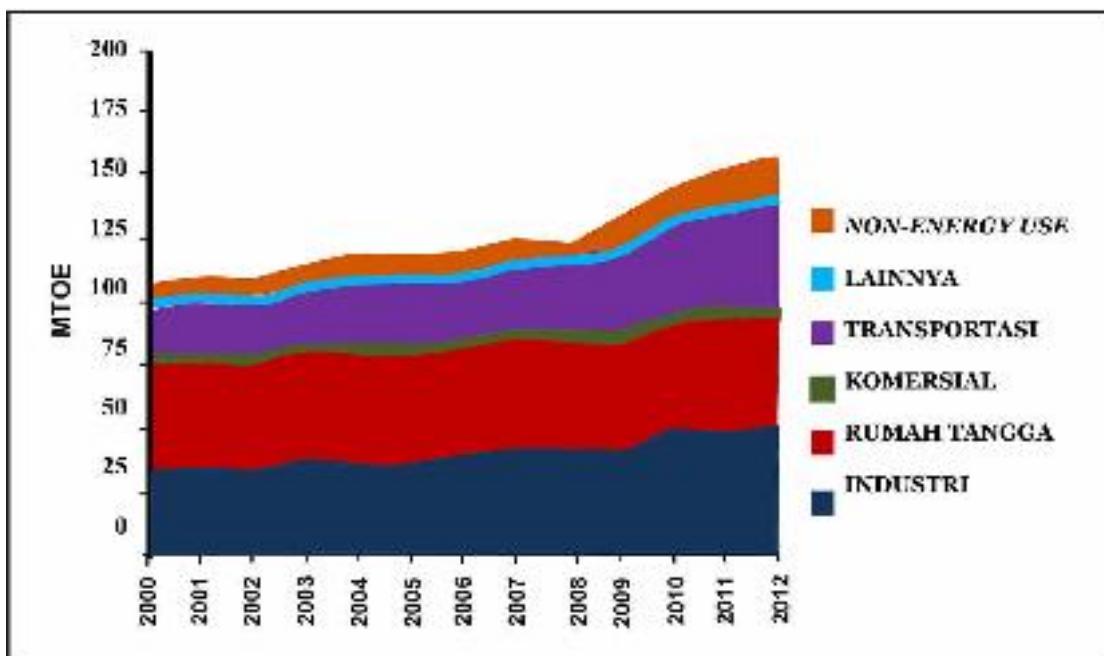
Konsumsi energi final tahun 2012 menunjukkan bahwa konsumsi mencapai sekitar 109,5 MTOE, sedangkan tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 158,9 MTOE. Peningkatan rata-rata sebesar 2,8 % per tahun. Sektor pengguna energi meliputi rumah tangga, industri, transportasi, komersial, dan sektor lainnya serta non-energy use.

Porsi masing-masing sektor utama tersebut dari total konsumsi energi final di tahun 2012 adalah sektor rumah tangga sebesar 37%; industri 30,5%; transportasi 27,6%; dan sisanya sebesar 4,9% digunakan oleh komersial, sektor lainnya, dan non-energy use.<sup>34</sup>

33 HEESI 2013, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian ESDM.

34 Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian ESDM, "Analisis Data Strategis ESDM," 22.

## KONSUMSI ENERGI FINAL



Sumber : Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian ESDM<sup>35</sup>

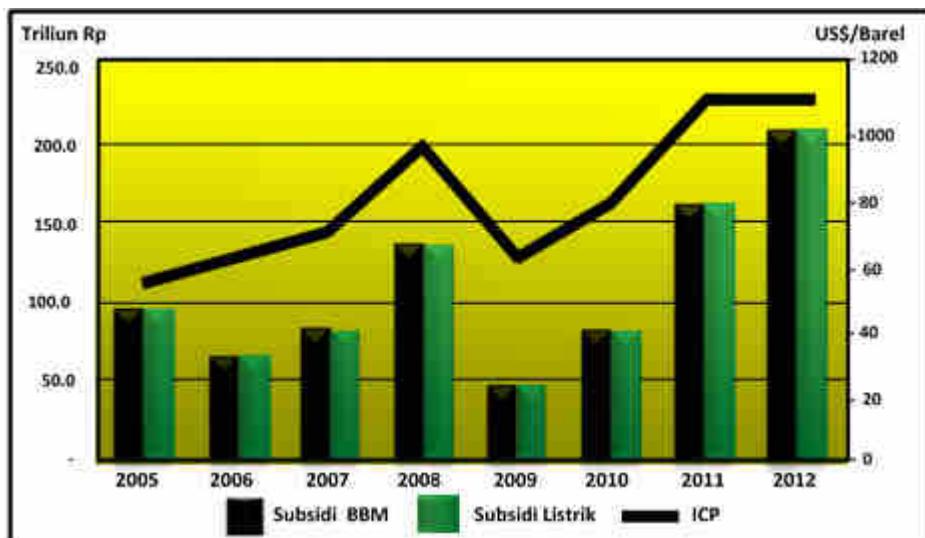
Subsidi energi tidak terlepas dari pola pikir masyarakat yang terbentuk dari wacana Indonesia sebagai penghasil Migas yang memiliki sumber kekayaan alam. Kenyataannya Indonesia justru mengimpor minyak dari luar untuk memenuhi kebutuhan energinya. Upaya pemerintah sejak Total subsidi energi tahun 2012 sebesar Rp. 315,23 triliun atau mencapai 3 kali jumlah subsidi pada tahun 2009, yaitu Rp. 98,7 triliun. 70% dari jumlah subsidi energi merupakan subsidi BBM/LPG dan 30% untuk subsidi listrik di tahun 2012. Nilai subsidi energi pada periode 2009-2012 mencapai +83% dari total subsidi yang disediakan dalam APBN.<sup>36</sup>

35 HEESI, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian ESDM, 2013.

36 Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian ESDM, "Rencana Umum Energi Nasional," Jakarta: Kementerian ESDM, 2013, 19.

## PERKEMBANGAN SUBSIDI ENERGI

TAHUN 2008 – 2012



Sumber : Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian ESDM<sup>37</sup>

Cadangan minyak nasional pun terus mengalami penurunan. Produksi minyak bumi diperkirakan sebesar 355 juta barel per tahun selama kurun waktu 2004-2012 dengan mengacu pada laju tingkat produksi. Perkiraan cadangan energi tersebut akan habis pada tahun 2022.<sup>38</sup> Total cadangan terbukti tahun 2012 tercatat hanya 2,7 miliar barel atau sekitar 0,15% dari total cadangan dunia. Sebagian besar cadangan terletak di Pulau Jawa dan Sumatera. Fokus investasi belakangan ini bergeser

ke cadangan laut dalam di kawasan Indonesia Timur, cekungan Kutai, Papua Barat, dan Laut Arafura.<sup>39</sup>

Akibatnya, Indonesia telah menjadi net oil importer sejak tahun 2004.<sup>40</sup> Ketergantungan akan impor minyak mencapai 1/3 dari kebutuhan minyak dalam negeri tahun 2012. Diperkirakan akan terus naik hingga 40% pada tahun 2018. Impor minyak tersebut sebagian besar berasal dari Nigeria, Arab Saudi, Irak, dan Azerbaijan. Indonesia melakukan ekspor 275 Bph minyak mentah dan Non-Gas Liquid (LNG) ke negara Pasifik,

37 Pusat Data dan Teknologi Informasi, "Rencana Umum Energi Nasional," Jakarta: Kementerian ESDM, 2013.

38 Pusat Data dan Teknologi Informasi, "Rencana Umum Energi Nasional," 26.

39 Pusat Data dan Teknologi Informasi, "Analisis Data Strategis ESDM Untuk Mendukung Kajian Review Kebijakan Sektor Energi," Jakarta: Kementerian ESDM, 2013, 27.

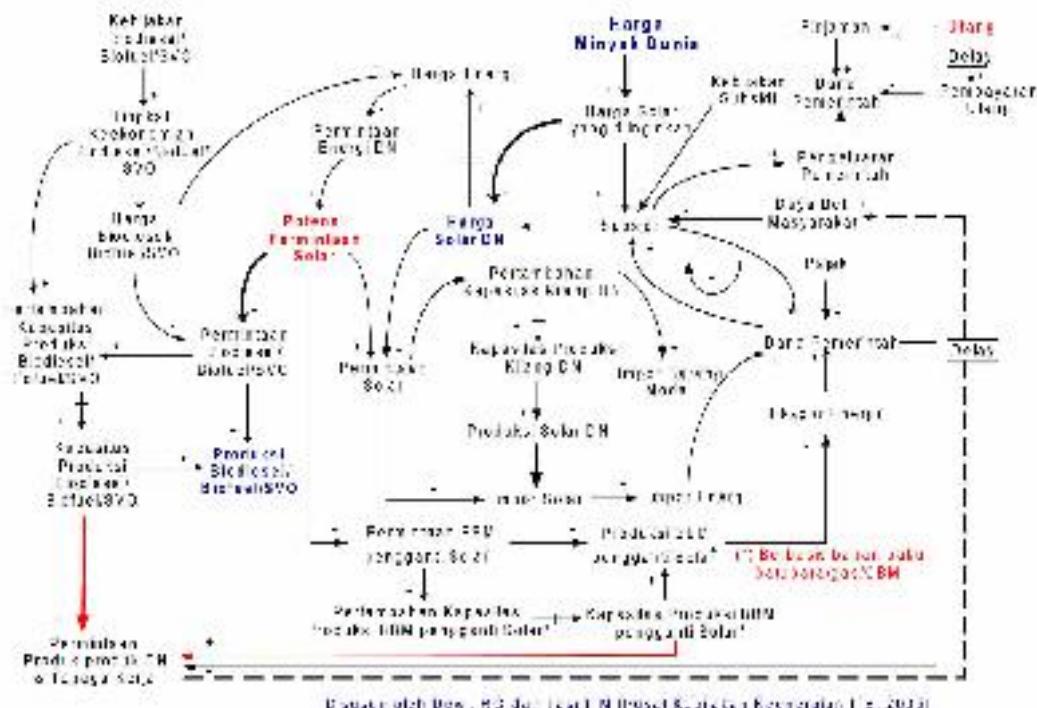
40 Pusat Data dan Teknologi Informasi, "Analisis Data Strategis ESDM," 31.

terutama Jepang di tahun 2012. Untuk memenuhi keterbatasan kapasitas kilang minyak dalam negeri, impor juga dilakukan hingga 35% berupa produk olahan minyak dari Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Kuwait. Premium merupakan produk impor terbesar sebesar 57% yang didatangkan dari Singapura, diikuti diesel sebesar 21%, dan LPG sebesar 17%.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Pusat Data dan Teknologi Informasi, "Analisis Data Strategis ESDM," 26.

Struktur dinamika dampak pengembangan biodiesel dan straight vegetable oil di dalam negeri seperti yang diskemakan pada gambar berikut, dengan penjelasan; Produksi minyak mentah Indonesia tahun 2015 adalah ± 790.000 BMpH (barel minyak per hari), sedangkan kebutuhan dalam negeri Indonesia adalah ± 1.790.000 BMpH. Akibatnya, pemerintah harus mengimpor kurang lebih 500

## DINAMIKA DAMPAK PENGEMBANGAN BIODIESEL DAN STRAIGHT VEGETABLE OIL TERHADAP MAKROEKONOMI INDONESIA



Sumber: Pusat Penelitian Energi – ITB, 2005

ribu BmpH atau sekitar 3,4 trilyun rupiah per hari. Hal tersebut diatas menjadikan Indonesia keluar dari negara eksportir minyak menjadi net importir, yakni akibat dari kandungan minyak tidak berimbang dengan kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, analisa menunjukkan adanya tiga masalah penting yaitu; a. hutang luar negeri; b. harga minyak dunia; dan c. kebijakan energi bioenergi.

Sampai dengan sekarang ini, Indonesia memiliki hutang luar negeri yang diakibatkan oleh besarnya pinjaman. Oleh karena itu, untuk mengatasi pinjaman tersebut perlu menggunakan dana pemerintah, sehingga dana pemerintah semakin hari semakin berkurang. Dihadapkan pada tingginya harga minyak dunia yang mempengaruhi semua kebutuhan masyarakat, hal ini mengakibatkan daya beli masyarakat semakin menurun, sehingga pemerintah melakukan kebijakan subsidi. Dengan kebijakan subsidi tersebut, berdampak pada berkurangnya dana pemerintah karena harus menstabilkan harga minyak yang diinginkan oleh dalam negeri.

Harga minyak dalam negeri (solar) adalah cara yang harus dilakukan dan harus menyamakan dengan harga energi dunia. Dihadapkan pada permintaan minyak (solar) maka pemerintah melakukan kegiatan impor sesuai kebutuhan dalam negeri yang semakin hari semakin meningkat, selain itu pemeritah harus melakukan kegiatan import untuk menutupi kebutuhan dalam negeri yang semakin hari semakin meningkat. Pemerintah juga harus melaksanakan kegiatan penambahan kapasitas kilang minyak dalam negeri dalam rangka meningkatkan produksi solar dalam negeri. Dilihat dari perkembangan permintaan solar berpotensi meningkatkan permintaan solar khususnya Biodiesel/Biofuel/Straight Vegetable Oil (SVO).

Potensi permintaan solar yang semakin bertambah yang sesungguhnya dapat diatasi dengan upaya penggantian solar (BBM) dengan penambahan kapasitas produksi BBM pengganti solar (fosil). Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah melakukan kebijakan Biodiesel/Biofuel/SVO dalam rangka meningkatkan keekonomian melalui penggunaan biodiesel/biofuel/SVO akan

membutuhkan penambahan tenaga kerja.

Jika tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat Indonesia maka penghasilan yang didapati akan mempengaruhi (didelay) terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Dengan penambahan daya beli masyarakat tersebut berdampak pada pengurangan subsidi, dengan pengurangan subsidi tersebut maka dana pemerintah akan bertambah atau paling minimal tetap.

## 11. Peran TNI AD Hingga Saat Ini.

### a. TNI AD dan Ketahanan Pangan.

Sejauh ini pemerintah, dengan pendampingan dan pengawalan yang dilaksanakan oleh TNI AD, telah menyiapkan sejumlah langkah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, diantaranya: membagikan 9 juta hektare lahan ke petani; menambah kepemilikan lahan dari 0,3 ha menjadi 2 ha per keluarga petani; perbaikan irigasi di 3 juta ha sawah; membangun 25 bendungan; mencetak 1 juta ha sawah baru; mencetak 1 juta ha lahan pertanian kering baru di luar Jawa-Bali; mendirikan bank pertanian;

mendorong industri pengolahan; membangun 1.000 desa berdaulat benih; serta mengupayakan 1.000 desa menggunakan bahan organik. Namun kenyataannya, seluruh upaya pemerintah tersebut tidak banyak berpengaruh dalam upaya peningkatan produksi pangan.

1) Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL). Swasembada pangan (Padi, Jagung dan Kedelai) tidak hanya ditentukan oleh luasnya lahan sawah yang dimiliki, jumlah lahan yang dimiliki, jumlah dan kehebatan para penyuluh lapangan serta seberapa besar peran Bulog, tetapi ditentukan juga oleh ketersediaan lingkungan lahan. Ketika kita berbicara tentang kesiapan lingkungan, khususnya lingkungan hutan dan lahan maka sesungguhya peran TNI itu sudah dilakukan sejak diberlakukannya kegiatan reboisasi hutan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) secara nasional. Gerakan tersebut juga dilaksanakan di tiap-tiap Kodam, contohnya seperti yang dilaksanakan di Kodam III/Siliwangi, dengan melakukan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis Sunda (GRLKS). Gerakan

ini juga dilaksanakan diberbagai Kodam lain sejak tahun 2003 sampai diserahkan kembali kepada Pemerintah pada tahun 2008.

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya strategi pembangunan nasional. Berdasarkan pengalaman masa lalu penyelenggaraan RHL tidak mampu mengimbangi laju degradasi hutan dan lahan, sehingga perlu dilakukan percepatan melalui program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL). Kegiatan ini dimaksudkan sebagai gerakan moral berskala nasional yang terencana dan terpadu, dengan melibatkan berbagai pihak terkait baik pemerintah, badan usaha milik pemerintah/swasta, TNI, maupun masyarakat.<sup>42,43</sup> Keterlibatan TNI dalam GNRHL/GERHAN berperan sebagai pelopor dalam menggerakkan masyarakat untuk kegiatan penanaman di lapangan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Untuk pelaksanaan kepeloporan TNI

hanya dialokasikan biaya pada tingkat KODIM.<sup>44</sup>

Kegiatan yang paling menonjol guna mendukung program pemerintah yaitu adalah kegiatan TNI dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan lahan (GN-RHL). Dalam program tersebut, pemerintah mempunyai target 3 (tiga) juta hektar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2003 sampai 2007. Sebagai gambaran hasil kegiatan GN-RHL sejak 2004 sampai dengan tahun 2006 TNI telah berhasil melaksanakan GN-RHL seluas kurang lebih 860.000 hektar.<sup>45</sup>



Gambar.24. Persemaian ini merupakan karya prajurit di Markas Brigif Linud-3/Kostrad, Kecamatan Kariango, Kabupaten Maros, Sulsel, Senin (28/4) SP/M Kiblat Said.

42 Keputusan Menteri Kehutanan No.P.03/Men hut-V/2004 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

43 Keputusan Bersama 3 (tiga) Menko No. 09/KEP/MENKO /KESRA/III/2003, KEP.16/M. EKON/03/2003, dan KEP.08/MENKO/POLKAM/ III/2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional.

44 Petunjuk Teknis Kepeloporan TNI Nomor : Juknis/01/1/2004 14 Januari 2004.

45 Patriot TNI, edisi Juni 2007.



Kegiatan ini dilakukan di delapan Kodam (Komando Daerah Militer) yang tersebar di 25 Korem ( Komando Resort Militer) dan 115 Kodim (Komando Distrik Militer) yaitu:

- a) Kodam I/BB.
- b) Kodam II / Swj.
- c) Kodam III / Slw.
- d) Kodam IV/Dip.
- e) Kodam V/Brw.
- f) Kodam VI /Tpr.
- g) Kodam VII / Wrb.
- h) Kodam Jaya.
- a) Kodam Iskandar Muda.
- b) Kodam I / Bukit Barisan.
- c) Kodam II / Sriwijaya.
- d) Kodam III / Siliwangi
- e) Kodam IV / Diponegoro.
- f) Kodam V / Brawijaya.
- g) Kodam VI / Tanjung Pura.
- h) Kodam VII / Wirabuana.

Sedang di tahun 2005 TNI telah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di 12 (dua belas) Kodam yang tersebar di 41 Korem dan Kodim, yaitu:



- i) Kodam IX / Udayana.
- j) Kodam XVI/Pattimura.
- k) Kodam XVII / Tri kora.
- l) Kodam Jaya.

Demikian pula pelaksanaan GN-RHL di tahun 2006, TNI juga telah melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di 12 (dua belas) Kodam yang tersebar di 42 (empat dua) Korem dan mencakup 258 Kodim.

2) Program Emas Biru dan Emas Hijau. TNI AD telah pula melakukan kegiatan-kegiatan inovatif guna mendukung program pencapaian ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satu bentuk kegiatan inovatif tersebut adalah pencanangan program “Emas Biru dan Emas Hijau” oleh Kodam

XVI/Pattimura. Program tersebut dikhususkan untuk meningkatkan potensi kekayaan alam Provinsi Maluku, baik kekayaan alam di darat maupun di laut, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dikategorikan dalam wilayah termiskin ke-empat di Indonesia. Program tersebut dinilai sebagai upaya inovatif satuan kewilayahan dengan mempertimbangkan aspek kearifan dan budaya lokal. Harapan dari program tersebut tentunya dapat menggali sekaligus mengeksplorasi potensi sumber daya laut (Emas Biru) dan bumi (Emas Hijau) Maluku yang luar biasa, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.

3) Upaya Khusus Pengawalan dan Pendampingan. Harapan besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan, melalui upaya pengawalan dan pendampingan

TNI AD kepada Kementerian Pertanian, sangatlah besar dan tinggi. TNI AD, yang salah satu tugas pokoknya adalah “Operasi Militer Selain Perang” (OMSP), menerima perintah langsung dari Presiden RI untuk mendukung tercapainya target swasembada pangan dalam 3 tahun kedepan. Tidak kurang dari 2 kali Presiden memerintahkan TNI terlibat aktif mendukung swasembada pangan ini, yang pertama pada saat pertemuan di Istana Bogor, dan terakhir pada saat Presiden memberikan arahan kepada peserta apel Danrem dan Dandim terpusat di Pangkalan Bun Kalteng.

Dalam pelaksanaan tugas pengawalan dan pendampingan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, TNI AD menemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat pencapaian salah satu faktor dalam ketahanan pangan yaitu swasembada pangan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya :

a) Keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh Perum Bulog. Perum Bulog sampai dengan saat ini belum memiliki infrastruktur pergudangan yang mampu menyimpan gabah

dengan kadar air tinggi. Disisi lain, para pedagang besar beras di Indonesia, saat ini telah memiliki infrastruktur pergudangan untuk mengeringkan gabah/padi yang berkadar air tinggi, sehingga mampu menyerap beras dengan kualitas rendah.

Menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan Perum Bulog, TNI AD dalam program pengawalan dan pendampingan tidak memiliki payung hukum kuat yang dapat mengintervensi hal tersebut. Akibatnya, sampai dengan saat ini, TNI AD hanya melakukan koordinasi yang bersifat persuasif.

b) HPP yang ditetapkan hanya terikat pada Bulog. Penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap komoditas beras yang ditetapkan pemerintah, tidak mampu menyaingi harga yang berlaku di pasaran. Selain itu, HPP tersebut tidak mengikat semua pelaku pasar. Pemerintah tidak memiliki regulasi yang memaksa pasar mengikuti HPP. Hal ini berakibat pada penentuan mekanisme harga beras tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya pasar oligopolistik atau mekanisme

pasar yang dikuasai oleh beberapa pemodal besar yang cenderung dapat menguasai harga.

Hal lain tentang permasalahan HPP yaitu bahwa dalam menetapkan penetapan HPP, pemerintah tidak melibatkan petani atau organisasi petani. Hal ini penting karena dampak kebijakan itu nantinya akan dirasakan oleh semua petani dan seluruh masyarakat Indonesia. Lemahnya keterlibatan tersebut menyebabkan permasalahan beras tidak kunjung bisa diselesaikan sampai saat ini.

Menghadapi hambatan ini, sampai dengan saat ini, TNI AD tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam guna mengoptimalkan peran pendampingan dan pengawalan program swasembada pangan. Akibatnya, TNI AD hanya berupaya melalui kegiatan-kegiatan koordinatif antara petani, tengkulak maupun Bulog.

c) Lambatnya proses birokrasi. Organisasi di kalangan birokrasi tidak sama dengan organisasi militer yang memiliki garis komando yang jelas serta disertai dengan konsekuensi bersifat punitif. Akibatnya, instruksi

dari Kementerian Pertanian belum tentu dilaksanakan dengan baik oleh petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai ujung tombak program yang berhadapan langsung dengan petani.

Kaitannya dengan peran pendampingan dan pengawalan, TNI AD terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan permasalahan birokrasi ini. Koordinasi melalui rapat-rapat Muspida dan Muspika merupakan langkah yang baru dapat dilakukan oleh TNI AD untuk menerobos kebuntuan birokrasi, baik di level pemerintah pusat maupun daerah.

d) Penyusutan lahan pertanian. Salah satu penyebab diberlakukannya impor pangan di Indonesia, khususnya beras, jagung, dan kedelai, yaitu karena adanya kecenderungan terjadinya percepatan konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Penurunan luas lahan pertanian produktif, khususnya di Jawa dan Bali, terjadi akibat konversi status lahan bagi peruntukan pembangunan lainnya yang merupakan ancaman sangat serius terhadap produksi pertanian.



Jika permasalahan ketersediaan lahan dan penyusutan lahan, khususnya persawahan, tidak diatasi secara komprehensif, akan terjadi inkonsistensi peningkatan produksi padi. Lahan pertanian di Indonesia yang mengalami penyusutan mencapai 100.000 hektare per tahun dan pada tahun 2009 pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pada tahun 2007 ada program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL). Sebenarnya program itu sudah ditetapkan pemerintah sejak tahun 2003, tetapi digalakkan kembali oleh pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun-tahun awal, program itu terlaksana

dengan sangat baik dan konsisten. Namun, seiring berjalananya waktu dan berakhirnya MoU antara TNI AD dan Kementerian Kehutanan pada 2008, program tersebut dirasakan tidak lagi menjadi perhatian khusus dan cenderung stagnan.

e) Permasalahan yang berkaitan dengan persoalan buruh tani dan rumah tangga petani. Kedua permasalahan tersebut berdampak terhadap penurunan jumlah tenaga kerja pertanian. Rata-rata setiap tahun ada 500.000 petani yang beralih profesi. Penyusutan jumlah pekerja di bidang pertanian ini akan berlangsung dari tahun ke tahun. Hal ini akibat rendahnya pendapatan dibandingkan dengan tingginya energi yang terkuras, serta tawaran penghasilan yang lebih baik dengan menjadi buruh di perkotaan.

Penyusutan tersebut secara otomatis akan memengaruhi faktor produksi pertanian dan menjadi kendala serius dalam program swasembada pangan. Permasalahan buruh tani miskin di Indonesia harus dapat ditangani dengan baik. Jika permasalahan buruh tani miskin di Indonesia tidak dikelola dengan baik, hal itu akan berdampak langsung terhadap penurunan jumlah pekerja di bidang pertanian.

Selain soal buruh tani, permasalahan rumah tangga petani juga menjadi sangat krusial dalam pencapaian program swasembada pangan. Indonesia adalah negara agraris dengan potensi pertanian yang luar biasa. Sepatutnya negara ini maju dalam bidang pertanian, tetapi faktanya jumlah keluarga petani mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Fenomena penurunan jumlah rumah tangga petani tentunya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan petani. Tingkat pendapatan petani yang rendah umumnya disebabkan oleh rendahnya nisbah (rasio) kepemilikan lahan para petani Indonesia.

Data statistik menunjukkan bahwa nisbah kepemilikan lahan pertanian di Pulau Jawa hanya 0,14 hektare per KK (kepala keluarga), sedangkan di luar Pulau Jawa hanya 2,2 hektare per KK. Secara sederhana, dapat dianalisis bahwa kepemilikan lahan yang ekonomis minimal 2 hektare di Jawa dan 10 hektare di luar Jawa. Kepemilikan lahan yang kecil tersebut menandakan bahwa sulit meningkatkan taraf kehidupan ekonomi para petani.

b. TNI AD dan Ketahanan Energi.

TNI AD memegang peran yang cukup penting sejak awal negara ini berdiri. Cikal bakal Pertamina dimulai pada tahun 1957 dengan penunjukan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada waktu itu, Jenderal A.H. Nasution, sebagai Presiden Direktur PT. Pertambangan Minyak Nasional Indonesia (PT. PERMINA). Namun pada saat ini, peran TNI AD dalam mewujudkan ketahanan energi belum banyak terlihat, atau dapat dikatakan belum efektif.

1) Litbang TNI dalam Membantu Energi Alternatif. Salah



satu upaya yang telah dilakukan di dalam mengatasi kelangkaan energi baik oleh masyarakat maupun pemerintah pada saat ini adalah mencari sumber-sumber bahan bakar cair alternatif. Tidak hanya masyarakat, TNI AD melalui program-program penelitian dan pengembangan mencoba untuk mencari terobosan baru dalam rangka diversifikasi sumber energi.

a) Pemanfaatan Hitaullo (*Calophyllum Inophyllum L.*) sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). Mengingat kerosen dan minyak solar adalah komoditas energi yang pada saat ini perlu segera diatasi masalah penyediaannya di dalam negeri, maka pencarian sumber-sumber bahan bakar cair difokuskan kepada minyak-minyak nabati. Tanaman penghasil minyak-minyak nabati

yang pada saat ini sangat gencar diupayakan baik oleh masyarakat dan pemerintah adalah tanaman Jatropha Curcas (Jarak Pagar). Selain jarak pagar, ternyata Indonesia memiliki jenis-jenis tanaman lain yang juga sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar cair nabati alternatif pengganti kerosen dan minyak solar. Salah satu tanaman-tanaman potensial tersebut adalah Hitaullo (*Calophyllum Inophyllum L.*).

Kelebihan Hitaullo (*Calophyllum Inophyllum L.*) dibandingkan dengan tanaman-tanaman penghasil minyak-minyak nabati lainnya adalah memiliki kandungan minyak yang cukup tinggi dan memiliki komponen ester asam-asam lemak pada minyak yang



dapat digunakan untuk bahan bakar cair. Selain itu, tanaman ini juga memiliki bentuk dan ukuran pohon yang sangat besar, akar tunjang, dan dapat tumbuh di berbagai lokasi, termasuk tepi pantai dengan akar menjorok ke laut.

Minyak Hitauullo (*Calophyllum Inophyllum* L.) sendiri sempat diperkenalkan sebagai salah satu hasil temuan dan penelitian yang dilaksanakan di lingkungan Kodam III/Siliwangi. Kemampuan minyak ini ditengarai dapat digunakan untuk bahan bakar cair alternatif pengganti kerosen, pengganti minyak solar untuk mesin-mesin low speed. Karya TNI AD ini sebenarnya dapat dijadikan alternatif sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dapat dimanfaatkan secara nasional.

b) Pemanfaatan Biofuel sebagai Bahan Bakar Kendaraan Tempur. Upaya menemukan sumber energi baru juga merambah pada dicobanya sumber energi biofuel pada kendaraan tempur TNI AD. Hal ini merupakan suatu langkah awal untuk menemukan sekaligus menghemat penggunaan sumber energi tak terbarukan, dalam hal ini minyak bumi berbentuk solar dan bensin. Pada langkah awal, TNI AD masih mencoba menggunakan sumber biofuel baru tersebut bagi kendaraan dinas kecil dengan prosentasi 50% biofuel ujicoba dan 50 % bahan bakar awal. Jika proses ini berhasil, maka langkah selanjutnya akan digunakan prosentase yang lebih besar termasuk diujicobakannya penggunaan biofuel baru tersebut untuk bahan bakar kendaraan tempur.<sup>46</sup>

c) Pengembangan Motor Hybrid. TNI AD bekerja sama dengan Center for Innovation and Certification (CIC) Surya University telah bekerja sama dalam mengembangkan kendaraan bermotor berbahan bakar ganda (hybrid). Bahan bakar yang digunakan adalah bensin dan gas. Kelebihan kendaraan bermotor ini adalah memanfaatkan gas bertabung 3 Kg yang biasa digunakan oleh rumah tangga. Penggunaan gas tersebut diklaim memiliki keunggulan berupa penghematan konsumsi bahan bakar dan keamanan komponen sepeda motor. Selain itu, penggunaan gas pada sepeda motor dinilai cukup efisien bagi penggunaan sehari-hari dihadapkan dengan kenaikan harga BBM yang kian tidak terkendali.<sup>47</sup>

---

wawancara kepada Kasad Jenderal TNI Budiman saat pelaksanaan Seminar Nasional tentang Cyber Warfare di Institut Teknologi Bandung, Sabtu 14 Juni 2014. Ahmad Fikri, "Biofuel Untuk Bahan Bakar Tank," Tempo 15 Juni 2014 diakses dari <http://jakartagreater.com/tni-ad-persiapkan-biofuel-untilk-bahan-bakar-tank/>, pada tanggal 26 November 2015 pukul 15.30 WIB.

47 Keterangan didapat dari wawancara kepada Amir Hamzah, salah satu peneliti pada Center for Innovation and Certification Surya University pada pameran teknologi di Surya University Tangerang tanggal 19 Agustus 2014. Siti S. Alia dan Agus T. Haryanto, "Motor Hybrid, Bisa Gunakan Bensin dan LPG 3Kg," VivaNews tanggal 19 Agustus 2014, diakses melalui <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/530337-motor-hybrid-bisa-gunakan-bensin-dan-lpg-3-kg>, pada tanggal 26 November 2015 pukul 16.47 WIB.

2) Edukasi dan budaya hemat energi. Dalam pelaksanaan kehidupan berorganisasi, TNI khususnya TNI AD, telah berupaya untuk mengedukasi dan membudayakan program hemat energi. Pada aturan tentang penggunaan Air, Telepon, Gas dan Air telah ditetapkan tentang aturan penggunaan sumber-sumber energi tersebut. Pembatasan penggunaan air yang tidak perlu, budaya pemeliharaan fasilitas yang menggunakan air minum dan pola hemat penggunaannya merupakan bagian dari upaya TNI AD untuk menghemat penggunaan air minum. Termasuk pula dengan aturan yang berkaitan tentang penggunaan gas alam dan listrik. Hal ini semua dalam rangka untuk mengurangi beban negara dalam pembiayaan kebutuhan TNI, khususnya pada konsumsi energi.<sup>48</sup>

Bentuk lain dari pembelajaran dan pembudayaan hemat energi ini adalah dengan menetapkan Prosedur Tetap (Protap) di satuan jajaran TNI AD. Metode ini dinilai dapat membantu satuan dan institusi pada umumnya, dalam upaya membantu meringankan

---

48 Surat Telegram Kasad Nomor ST/2160/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Upaya Penghematan Energi Listrik dan Air.

beban negara. Selain itu, bentuk aturan ini juga menjadi metode doktrinasi bagi anggota TNI dan keluarga dalam melakukan penghematan terhadap penggunaan sumber daya dan energi negara. Hal ini merupakan langkah lanjutan dari Instruksi Presiden RI Nomor 13 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Penghematan Energi dan Air dengan penekanan pada penghematan yang harus dilakukan oleh institusi negara dalam rangka mengurangi beban negara.<sup>49</sup>

## 12. Keterlibatan Militer di Beberapa Negara dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi.

### a. Umum.

Dari beberapa literatur dapat dipelajari bahwa secara substansial konsep keamanan nasional di negara-negara demokrasi pada umumnya mencakup keamanan negara (state security), keamanan masyarakat (public security), dan keamanan manusia (human security). Di samping itu, konsep keamanan nasional senantiasa merujuk nilai-nilai

fundamental bangsa, dengan tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, dan interdependensi internasional.

Namun demikian ada perbedaan yang mendasar, yaitu orientasi atau titik berat yang di negara-negara demokrasi, konsep keamanan nasional pada umumnya mencakup keamanan negara, keamanan masyarakat dan keamanan manusia berbeda-beda sesuai dengan perbedaan nilai-nilai fundamental

bangsa, kepentingan nasional, dan kondisi lingkungan masing-masing. Hal itu terlihat pada keamanan nasional Amerika Serikat yang outward looking berorientasi global dalam kerangka memajukan faham demokrasi, Australia menggarisbawahi kemajuan yang telah dicapai dan stabilitas keamanan kawasan Asia-Pasifik, Rusia dengan keamanan nasionalnya yang tidak dapat terlepas dari pengaruh stabilitas keamanan kawasan Eropa yang bertitik berat pada keamanan dalam negeri terkait dengan proses demokratisasi yang sedang berlangsung di negara masing-masing.

<sup>49</sup> Surat Edaran Menhan RI Nomor SE/24/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 tentang Penghematan Energi dan Air serta Pembentukan Gugus Tugas.

*Setiap negara  
memiliki konsep  
ketahanan  
nasional  
masing-masing*

Dengan demikian maka kesimpulan berikutnya ialah tidak ada konsep ketahanan nasional yang tunggal dan seragam. Setiap negara memiliki konsep ketahanan nasional masing-masing. Secara umum konsep ketahanan nasional memang senantiasa mencakup keamanan negara dan keamanan insani, namun landasan filosofinya berbeda-beda, terlebih lagi pada tataran sistem, kebijakan, dan strategi keamanan nasional

b. Bentuk Peran Militer Asing dalam Kebijakan Ketahanan Pangan dan Energi.

Berdasarkan perubahan defensi dan pemahaman tentang keamanan, maka beberapa negara di dunia mengaplikasikannya dengan memanfaatkan kekuatan militer dalam rangka mengamankan kepentingan nasionalnya. Penggunaan kekuatan militer di berbagai tersebut disesuaikan dengan persepsi dan pandangan negara masing-masing tentang pentingnya keamanan pangan maupun energi.

1) Tiongkok Konflik Laut Tiongkok Selatan berpengaruh terhadap situasi di kawasan Asia.

Kepentingan Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Selatan sangatlah banyak mulai dari kepentingan ekonomi sampai kemampuan proyeksi kekuatan militer dan pengantar nuklir. Namun usaha-usaha Tiongkok untuk penetapan wilayah kedaulatan dan perluasan laut teritorialnya dari dulu memang tidak disambut dengan baik oleh negara-negara tetangganya yang selain merasa kedaulatannya dilanggar juga memiliki kepentingan di perairan tersebut.

Di samping itu, penetapan wilayah perairan Tiongkok secara unilateral bukan hanya tidak memiliki dasar hukum maupun historis yang jelas, tetapi juga melanggar konvensi hukum kelautan PBB (UNCLOS) yang ditandatanganinya pada tahun 1982. Meskipun secara ekonomi dan militer kuat, negara Tiongkok belum berani melakukan pembangunan untuk perluasan dan melakukan aktivitas proyeksi kekuatan secara frontal. Tiongkok masih harus mengandalkan akses jalur laut yang melewati kawasan ASEAN. Beberapa negara anggota ASEAN juga memiliki hubungan diplomatis kuat dengan Amerika Serikat, contohnya perjanjian

keamanan Filipina dengan AS. Oleh sebab itu, masih sangat penting bagi Tiongkok untuk mengambil pendekatan diplomatis dan politis dalam menghadapi negara-negara ASEAN.

Kepentingan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan tidak terbatas pada energy security maupun wilayah perikanan dan perdagangan. Daerah tersebut juga penting untuk strategi militer, khususnya manuver kapal selam nuklir dan deterrence. Isu konflik Laut Tiongkok Selatan cenderung menjadi fokus adalah persoalan energy security, namun secara sifat fisik Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah perairan yang semi tertutup, merupakan unsur penting dalam strategi nuklir Tiongkok.

Beberapa aktivitas Tiongkok di wilayah ini mengindikasikan keinginannya untuk membuka jalan untuk proyeksi kekuatan antara lain di tempat lindap. Tempat tersebut seperti Pulau Woody di kepulauan Paracel, di mana Tiongkok sedang memperpanjang dan memperbaiki landasan. Contoh lain adalah pembangunan struktur-struktur

di Mischief Reef yang terpencil. Banyak memandang semua ini sebagai tindakan tidak bersahabat dan memiliki kesan ekspansionis terhadap pelayaran komersial di Laut Tiongkok Selatan. Pelayaran yang didominasi bahan mentah bergerak menuju negara-negara Asia Timur melewati Selat Malaka dan Kepulauan Spratly. Sebagian besar adalah kargo cair seperti minyak dan gas alam cair (LNG), sedangkan setengah volume kargo yang melewati Kepulauan Spratly adalah minyak mentah dari Teluk Persia.

Tiongkok tidak ingin sekedar menciptakan ZEE yang luas tetapi juga ingin mengendalikan lautan untuk mencapai proyeksi kekuatan yang lebih jauh, termasuk untuk kapal selam rudal nuklir (SSBN), di jalur laut melewati Pasifik dan memasuki Samudra Hindia. Kemampuan deterrence nuklir berbasis laut merupakan prioritas dalam strategy militer. Tiongkok diperkirakan akan memperoleh kemampuan second-strike dengan memperkenalkan rudal SLBM JL-2 yang memiliki jangkauan 8000 km dan ICBM DF-31 dan DF-31A. Tiongkok juga sekarang sedang membangun base kapal selam di

Hainan. Menurut International Assessment and Strategy Center di Washington, pangkalan kapal induk pertama akan ada di Pulau Hainan dan akan mematroli rute-rute pelayaran. Tiongkok ingin menjadikan wilayah itu sebagai zona teritorial yang dijaga dengan ketat untuk operasi SSBN. Dengan dibangunnya kemampuan maritim tersebut akan memastikan bahwa kapal-kapal dari negara-negara lain akan bertemu dengan kapal perang Tiongkok. Upaya Tiongkok tersebut merupakan salah satu bentuk penggunaan kekuatan (use of force) dalam rangka mengamankan kepentingan negaranya di bidang energi. Hal ini dapat dikatakan wajar dengan berkembangnya kebutuhan akan energi oleh Tiongkok guna pemenuhan energi dalam negerinya.

2) Amerika Serikat. Dengan makin meningkatnya kebutuhan akan energi dalam negeri, khususnya kebutuhan energi minyak bumi, Amerika Serikat menempatkan kekuatan militernya untuk mendukung kebijakan politis tersebut. Kebutuhan akan minyak bumi terjadi didorong pula oleh kegiatan militer Amerika di berbagai belahan dunia. Hal

ini pula yang cenderung dinilai menjadi lingkaran tak berujung, kepentingan militer sebagai polisi dunia dan kepentingan pemenuhan kebutuhan akan energi.<sup>50</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat mulai melirik belahan bumi Asia sebagai sumber energi baru yang tentunya diikuti oleh aktivitas militer negara tersebut. Peningkatan jumlah pasukan marinir amerika di Darwin Australia, selain digunakannya alasan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana alam di daerah rawan gempa, tsunami dan topan ini, juga merupakan langkah politis untuk mengamankan kepentingan akan energi di wilayah tenggara dan selatan Asia.<sup>51</sup>

3) Australia. Diawali dengan dipromosikannya terminologi Indo-Pacific Region oleh Australia di berbagai media menunjukkan kepentingan wilayah yang meliputi Samudera Hindia sampai dengan

---

50 Gawdat Bahgat, "United States' Energy Security: Challenges and Opportunities," *The Journal of Social, Political and Economic Studies*, Volume 35, Number 4, 2010: 411.

51 Adam J. Liska and Richard K. Perrin, "Securing Foreign Oil: A Case for Including Military Operations in the Climate Change Impact of Fuels," *Environment Magazine*, Volume 52, Number 4, 2010: 9-22.



Samudera Pasifik di bidang keamanan, perdagangan dan diplomasi. Hal ini ditekankan beberapa kali khususnya dalam Australian Defence White Paper 2013 yang menyebutkan bahwa prioritas ke-tiga kepentingan Australia di bidang pertahanan adalah ikut andil dalam mengamankan wilayah Indo-Pacif c khususnya Asia Tenggara<sup>52</sup>

Tentunya hal diatas adalah bentuk perhatian Australia terhadap makin aktifnya beberapa kekuatan ekonomi baru di wilayah tersebut.<sup>53</sup>

Kekuatan ekonomi yang didukung oleh penggunaan kekuatan militer yang terjadi di wilayah Asia Pasifik tersebut berimplikasi pada perubahan kebijakan bidang keamanan Australia. Aplikasi dari perubahan kebijakan bidang keamanan tersebut adalah dengan disetujuinya proposal peningkatan anggaran bagi pengembangan kapabilitas aset kapal selam, pesawat pengintai Angkatan Laut, pesawat tanpa awak pengintai serta peningkatan kerjasama penginderaan dengan Amerika Serikat. Kesemuanya itu dilakukan untuk meningkatkan pengamanan terhadap kepentingan Australia di wilayah Indo-Pasifik khususnya dalam hal perdagangan dan energi.

52 Commonwealth of Australia, "Defence White Paper 2013," Canberra, 2013, 26-28.

53 Rory Medcalf, "In Defence of the Indo-Pacific: Australia's New Strategic Map," *Australia's Journal of International Affairs*, Vol. 68, No. 4, 2014: 470-483.

*..Penggunaan kekuatan militer di berbagai tersebut disesuaikan dengan persepsi dan pandangan negara masing-masing tentang pentingnya keamanan pangan maupun energi...*



## BAB IV

### IMPLIKASI DAN STRATEGI PERAN TNI AD

#### 13. Umum.

Melihat pada teori, data serta fakta, termasuk latar belakang strategis tentang perubahan def nis i keamanan global kaitannya dengan ketahanan nasional, maka dapat kita analisa pengaruhnya pada peran TNI AD dalam mewujudkan ketahanan nasional. Dalam konteks kajian kali ini, TNI AD menggunakan pendekatan ketahanan pangan dan energi guna mewujudkannya. Berkaitan dengan hal tersebut bagi TNI AD dalam melaksanakan perannya untuk

mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional ini melekat pada diri individu-individu personel TNI AD maupun institusi. Pada kondisi seperti sekarang ini peran TNI AD sangat penting, sesuai landasan teori tentang peran dan keamanan pada BAB II, yaitu dalam hal:

- a. Peranan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi tersebut tertentu harus dilaksanakan karena struktur masyarakat yang terbentuk dalam wadah negara Republik Indonesia harus dipertahankan kelangsungan hidupnya sebagai masyarakat dari negara yang berdaulat.
- b. Peranan yang dilakukan oleh TNI AD tersebut seyogyanya



dilekatkan pada individu-individu yang dianggap oleh masyarakat mampu melaksanakannya, oleh karena itu para Prajurit TNI AD harus lebih dahulu terlatih dan menpunyai hasrat untuk melakukannya.

c. Prajurit TNI AD sesungguhnya telah memiliki Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang melekat pada dirinya selama mereka terbentuk menjadi seorang Prajurit dan selalu dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan setiap peran ditengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara.

d. Walaupun semua Prajurit TNI AD telah sanggup dan

mampu melaksanakan peranannya, belum tentu kelompok masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat tertentu, terutama para stakeholder membatasi peluang-peluang itu. Karena dikhawatirkan akan berdampak pada pengambil alihan kegiatan yang mereka ampu.

e. Sebagai stakeholder utama pertahanan, maka TNI AD sangat berkepentingan dalam proses perwujudan stabilitas nasional dalam rangka mengawal kepentingan nasional (national interest) bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, menjaga agar setiap unsur ketahanan nasional tetap terjaga kestabilannya.

## **14. Implikasi Perubahan Def nisi Keamanan terhadap Peran TNI AD pada Ketahanan Nasional.**

Indonesia yang memiliki luas wilayah 5.180.053 km<sup>2</sup>, merupakan negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam hal sumber daya alam energi dan pertanian, tetapi pada kenyataannya jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat tinggi. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 menunjukkan, jumlah penduduk miskin Indonesia diperkirakan mencapai 28,59 juta jiwa.<sup>54</sup> Indonesia juga masih mengimpor beberapa komoditas energi dan pangan, seperti minyak mentah, bahan bakar olahan, beras, jagung, dan kedelai.<sup>55</sup> Hal itu sangat kontradiktif dengan kondisi

sumber daya alam dan sumber daya pertanian yang ada.

***TNI AD sebagai salah satu komponen bangsa yang berkepentingan dengan terjaminnya keutuhan dan keselamatan bangsa, perlu berpartisipasi sebagai wujud kepedulian terhadap negara.***

Kini mulai terjadi pergeseran latar belakang krisis global yang dapat mengakibatkan perang, yaitu kepentingan energi dan krisis pangan.<sup>56</sup> Krisis energi dan pangan juga telah menjadi ancaman global akibat beberapa persoalan globalisasi, antara lain perubahan def nisi keamanan secara global, perubahan iklim global yang ekstrem, laju pertumbuhan penduduk dunia yang semakin pesat, serta menipisnya sumber daya energi dan sumber daya pangan. Dengan demikian, masa depan ketahanan pangan dan energi global menjadi lebih rawan.<sup>57</sup>

Menurut teori keamanan global yang telah dibahas pada BAB II, bentuk ancaman telah bergeser dari hanya ancaman yang bersifat militer menjadi ancaman yang bersifat lebih luas. Arti dalam konteks ini adalah hal yang lebih menyentuh

54 Website Resmi BPS, diunduh pada 12 Oktober 2015.

55 Siska Amelie F Deil, "Daftar 29 Bahan Pangan yang Diimpor RI sampai November", *Liputan 6*, 4 Januari 2014, diunduh pada 12 Okt 2015, <http://bisnis.liputan6.com/read/791549/daftar-29-bahan-pangan-yang-diimpor-ri-sampai-november>.

56 Laurence C. Smith, "The World in 2050, Four Forces Shaping Civilization's Northern Future," (Los Angeles: Penguin Publishing Group, 2010).

57 Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang Bappenas 2005- 2025,hlm 6-7.



pada keamanan manusia dalam suatu bangsa tersebut (human security). Human security tersebut menyangkut didalamnya food security dan energy security, yaitu pentingnya ketersediaan pangan dan energi bagi warna suatu negara. Dalam konteks inilah urgensi keterlibatan TNI AD dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional dalam rangka mewujudkan kepentingan bangsa (national interest).

a. Peran TNI AD pada Ketahanan Pangan.

Menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), harga pangan dunia meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun terakhir dan disusul dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu mengakses bahan

pangan.<sup>58</sup> Kekhawatiran utama ialah terjadinya gejolak sosial dan politik di negara-negara yang mengalami krisis pangan, seperti yang terjadi di Somalia.<sup>59</sup>

Menurut laporan Global Information and Early Warning System yang dipublikasikan FAO pada Februari 2008, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami krisis pangan.<sup>60</sup> Krisis pangan yang dialami Indonesia disebabkan kenaikan harga pangan dunia yang diperparah oleh bencana alam, seperti banjir, gempa dan tanah longsor. Sementara kebutuhan pangan di Indonesia

58 Badan Ketahanan Pangan, diunduh pada 12 Okt 2015, [http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/BULETIN%20JULI%202013%20\(1\).pdf](http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/BULETIN%20JULI%202013%20(1).pdf).

59 James Ferguson, "The World's Most Dangerous Place: Inside the Outlaw State of Somalia," (London: Transword Publisher, 2013), hlm 131-156.

60 FAO, diunduh pada 12 Okt 2015, <http://www.fao.org/giews/english/index.htm>.



terus meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut FAO, Indonesia termasuk negara yang membutuhkan bantuan negara lain untuk mengatasi krisis tersebut. Pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1998, melonjaknya harga beras menjadi salah satu pemicu kerawanan sosial dan instabilitas politik yang diikuti penyerahan kekuasaan pemerintahan pada saat itu. Sulitnya kondisi rakyat akibat harga beras yang tidak terjangkau merupakan salah satu faktor yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan teori keamanan nasional yang dikemukakan Barry Gordon Buzan dalam bukunya *Security: A New Framework for Analysis*, salah satu dimensi dari keamanan nasional

ialah keamanan secara ekonomi yang ditopang oleh kemampuan negara dalam menyediakan kebutuhan rakyatnya.<sup>61</sup>

Swasembada pangan ataupun ketahanan pangan bertujuan mencapai terpenuhinya kebutuhan pangan suatu negara, tetapi dengan cara berbeda. Swasembada pangan fokus pada peningkatan produksi pangan dalam negeri, sedangkan ketahanan pangan fokus pada terjaminnya ketersediaan pangan bagi rakyat.

Dari perspektif ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan nasional dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan, termasuk impor.

<sup>61</sup> Barry Buzan, "Ole Wæver dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*," (Copenhagen: School of Security Studies, 1997), 89.

Namun, sebaliknya, impor bahan pangan tidak memenuhi syarat bagi terminologi swasembada pangan. Selain itu, ketersediaan pangan yang tidak seimbang dibandingkan dengan kebutuhan suatu negara dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketersediaan pangan terganggu. Krisis pangan yang mungkin terjadi di Indonesia dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Bisa dipahami bahwa swasembada pangan sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan kalau tidak terpenuhi bisa mengancam kedaulatan negara. TNI AD sebagai salah satu komponen bangsa yang berkepentingan dengan terjaminnya keutuhan dan keselamatan bangsa, perlu berpartisipasi sebagai wujud kepedulian terhadap negara.

Pada setiap era pemerintahan, mulai dari masa Orde Baru sampai masa pemerintahan era reformasi, swasembada pangan selalu menjadi isu menarik dan dijadikan komoditas politik. Adanya perbedaan pendapat beberapa petinggi nasional beberapa waktu

lalu tentang kebijakan impor beras menunjukkan bahwa pencanangan swasembada pangan, khususnya beras, pada tahun 2017 oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo tidak serta-merta mendapat dukungan penuh secara politik. Kebijakan itu mempengaruhi kepentingan berbagai pihak, dan yang paling menonjol ialah dugaan bahwa banyak pihak yang menjadikan kebijakan impor beras sebagai lahan untuk mendapat keuntungan pribadi. Hal itu terjadi karena beras impor yang datang ke Indonesia memiliki harga yang relatif rendah dengan kualitas cukup baik. Sejatinya, hal itulah yang mengakibatkan kebijakan swasembada pangan menjadi sesuatu yang kontroversial dan menjadi kendala utama dalam pencapaian swasembada pangan, khususnya beras.

Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia (World Food Summit) yang digelar FAO pada tahun 1996 menghasilkan deklarasi dan rencana aksi (action plan). Deklarasi yang dihasilkan bertujuan mengurangi jumlah penduduk rawan pangan (food insecurity) dari sekitar 800 juta jiwa menjadi 400 juta jiwa atau setengahnya pada tahun

2015. Namun, lima tahun sejak KTT Pangan Dunia tahun 1996 itu, pengurangan angka kelaparan hanya mencapai 8 juta orang, dari target 22 juta orang per tahun.

Oleh karena itu, FAO menyelenggarakan World Food Summit: Five Years Later di Roma pada tanggal 10-13 Juni tahun 2002. Konferensi itu mengesahkan deklarasi Aliansi Internasional Melawan Kelaparan (International Alliance Against Hunger). KTT itu mempertegas kembali komitmen dunia untuk menjamin keamanan pangan dan mengikis kemiskinan. Target pun direvisi: jumlah penduduk kelaparan dan kurang gizi harus dapat dikurangi sebanyak 24 juta jiwa setiap tahunnya sampai 2015.

Indonesia menerima konsep ketahanan pangan yang dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.<sup>62</sup> Undang-undang itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.<sup>63</sup> Indonesia memasukkan aspek

keamanan, mutu, dan keragaman pangan sebagai kondisi yang harus terpenuhi dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara cukup, merata, dan terjangkau.

Dengan demikian, setiap negara termasuk Indonesia dituntut memantapkan ketersediaan pangan. Fakta aktual menunjukkan bahwa ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan Indonesia belum kokoh yang terindikasi dari masih tingginya tingkat impor produk pangan.<sup>64</sup> Dalam kondisi seperti itu, hal terpenting dalam mewujudkan ketahanan nasional ialah meningkatkan produksi pangan nasional secara berkelanjutan, dan target swasembada pangan pada tahun 2017 yang dicanangkan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo di tahun 2015. Waktu tiga tahun bukanlah masa yang panjang untuk mewujudkan target itu, tetapi bukan juga sesuatu yang mustahil untuk mewujudkannya. Diperlukan upaya maksimal untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan, khususnya pada komoditas beras, jagung, dan kedelai.

62 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

63 Peraturan Presiden No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

64 Muhammad AS Hikam, "Memperkuat Ketahanan Pangan Demi Masa Depan Indonesia," (Jakarta: LIPI, 2014), 15.



Menyadari kondisi tersebut, Kementerian Pertanian selaku lembaga utama di bidang pertanian telah mengambil langkah dengan melibatkan TNI AD untuk mendukung program swasembada pangan. Pelibatan tersebut didasari oleh nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Pertanian dan Kepala Staf Angkatan Darat yang ditandatangi pada tanggal 8 Januari 2015.

Selanjutnya, MoU tersebut dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pangan Kementerian Pertanian dengan Asisten Teritorial Kasad.<sup>65</sup>

Petunjuk pelaksanaan tersebut memuat kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang bersifat teknis, sesuai dengan tingkatannya, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Pelibatan prajurit TNI AD dalam program swasembada pangan dikhususkan pada peningkatan produksi pertanian yang implementasinya dilakukan melalui pelaksanaan pendampingan dan pengawalan. Program pendampingan dan pengawalan oleh TNI AD lebih banyak dilakukan oleh satuan komando kewilayahan (Kowil) mulai dari tingkat Kodam sampai dengan Koramil beserta para bintara pembina desa (babinsa)-nya.

65 Perjanjian Kerjasama Dirjen Prasarana dan Sarana pertanian, Kementerian Pertanian RI dengan Aster Kasad Nomor 06/SR.120/b.1/01/2015 tanggal 2 Januari 2015.

Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dengan melibatkan TNI AD dalam program swasembada pangan dinilai efektif dalam meningkatkan produksi pangan.<sup>66</sup> Namun, jika dihadapkan pada dinamika lapangan, seperti penyusutan lahan dan tata kelola niaga pangan, tugas dan peran TNI AD melalui kegiatan pendampingan dan pengawalan dirasakan belum maksimal dalam membantu pemerintah memenuhi stok pangan nasional, khususnya beras. Hal tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh faktor produksi beras di sektor hulu, tetapi lebih pada permasalahan di sektor hilir pasca produksi. Dengan demikian, stok beras nasional belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya ketika menghadapi musim kering. Akibatnya, muncul wacana melakukan impor beras guna memenuhi stok beras nasional. Wacana impor beras secara otomatis akan menurunkan harga beras Indonesia dan akan berdampak buruk terhadap para petani, selain akan menurunkan produktivitas para petani beras.<sup>67</sup>

Dapat dianalisis bahwa kebijakan impor beras sangat bertolak belakang dengan program swasembada pangan.

Persoalan utama dari tidak terpenuhinya stok beras nasional ialah tata kelola niaga beras. Peran Bulog sebagai badan pemerintah yang membidangi manajemen logistik beras kurang mampu menyerap hasil produksi beras nasional. Untuk merespons kondisi tersebut, pada tanggal 26 Agustus 2015 dilaksanakan Rapat Upaya Khusus Peningkatan Industri Perberasan yang dihadiri oleh lebih dari empat ribu pelaku usaha perberasan nasional dari mulai skala kecil, sedang, dan besar.

Rapat yang diprakarsai oleh Panglima TNI, Kasad, dan Menteri Pertanian telah menghasilkan komitmen dari para pelaku usaha perberasan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dengan menjual hasil produksi beras

---

Beras”, *Detik*, 1 Okt 2015, diunduh pada 22 Okt 2015, <http://finance.detik.com/read/2015/10/01/073207/3032487/459/mentan-amran-sulaiman-blak-blakan-soal-wacana-impor-beras>; Trung Chanh, “Vietnam wins Indonesia rice deal for one million tons”, *The Saigon Times*, 8 Okt 2015, diunduh 22 Okt 2015, <http://english.thesaigontimes.vn/43432/Vietnam-wins-Indonesia-rice-deal-for-one-million-ton.html>.

66 Laporan Realisasi Luas Tanam, Berdasarkan Pj Provinsi Melalui Lo PSP Sterad Agustus 2015.

67 Michael Agustinus, “Mentan Amran Sulaiman Blak-Blakan Soal Wacana Impor



kepada Bulog. Hal itu merupakan suatu bentuk respons dari TNI AD untuk menjawab masalah aktual di lapangan, serta untuk mendukung kegiatan pendampingan dan pengawalan yang sedang dilaksanakan.

Program pemerintah yang menargetkan swasembada pangan dalam jangka waktu tiga tahun ke depan merupakan wujud dari program Nawacita yang menjadi misi kabinet kerja pemerintahan saat ini. Dengan melibatkan TNI AD dalam implementasi program tersebut, diharapkan dapat mengatasi kendala di lapangan. Peran serta TNI AD untuk menyelesaikan masalah yang bersifat strategis dalam permasalahan swasembada pangan

juga menjadi faktor kritis untuk suksesnya pelaksanaan program swasembada pangan.

b. Peran TNI AD pada Ketahanan Energi.

Berdasarkan fakta tentang lingkungan strategis yang berkembang, maka ketegangan di Laut Tiongkok Selatan dapat berimbas pada ketahanan energi nasional Indonesia.<sup>68</sup> Perairan dan daratan di sekitar Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Tiongkok Selatan, yang diindikasikan secara geologi mengandung potensi minyak dan gas sangat besar, sejak 10 tahun terakhir menjadi sengketa kepemilikan yang melibatkan enam negara, yaitu Tiongkok, Taiwan,

---

<sup>68</sup> Muhammad AS. Hikam (ed), "Ketahanan Energi Indonesia 2015-2025: Tantangan dan Harapan," (C.V. Rumah Buku, Jakarta: 2015), 48.

Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia. Namun, karena ada kepentingan, akhirnya AS juga ikut terlibat.

Perebutan ruang tersebut akan memberikan implikasi luas terhadap politik, ekonomi, dan keamanan kawasan.<sup>69</sup> Sebab, pengendalian ruang di Laut Tiongkok Selatan akan terkait langsung dengan keamanan energi dan keamanan maritim, dua isu yang saat ini dan masa mendatang senantiasa menjadi perhatian dunia internasional.

Sengketa di Laut Tiongkok Selatan, walaupun Indonesia tidak termasuk negara pengklaim, ditengarai berimbang langsung terhadap keamanan nasional, terlebih lagi bila mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.<sup>70</sup> Kepentingan Indonesia terhadap perairan strategis di Laut Tiongkok tersebut meliputi tiga aspek, yaitu politik, ekonomi, dan militer. Sengketa tersebut, apabila bereskalasi akan berdampak pada terancamnya perdamaian dan stabilitas kawasan.

Kondisi tersebut sangat jelas bertentangan dengan kepentingan politik Indonesia tentang menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Eskalasi sengketa Laut Tiongkok Selatan akan memberikan implikasi politik yang signifikan terhadap Indonesia

Implikasi tersebut pada satu sisi akan menempatkan Indonesia pada posisi terjepit dalam pertarungan kepentingan kekuatan besar di kawasan, yaitu AS versus Tiongkok.<sup>71</sup> Pada sisi lain, kepentingan nasional Indonesia di Laut Tiongkok Selatan juga terancam karena wilayah ZEE Indonesia di perairan itu dipastikan akan terkena perluasan akibat yang ditimbulkan. Fakta bahwa Tiongkok pada 1993 telah menerbitkan peta berbentuk huruf U atau nine dash line yang mengklaim pula ZEE Indonesia, merupakan faktor lainnya yang mendorong Indonesia harus berperan aktif dalam mencari solusi sengketa di Laut China Selatan.

Implikasi ekonomi secara langsung terhadap Indonesia dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan

Hikam, "Ketahanan Energi Indonesia,"

69. Hikam, "Ketahanan Energi Indonesia,"

48.

70. Hikam, "Ketahanan Energi Indonesia,"

49.

71

50.



yaitu terancamnya pendapatan negara dari ladang gas bumi di ZEE Indonesia di perairan tersebut. Selama ini, ladang gas bumi di wilayah ZEE Indonesia memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara dan menjadikan Kabupaten Natuna sebagai salah satu daerah otonom dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Indonesia. Adapun implikasi ekonomi secara tidak langsung adalah meningkatnya biaya transportasi laut untuk komoditas ekspor Indonesia ke kawasan Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan. Rute pelayaran akan berubah melalui Selat Makassar dan terus ke utara melalui perairan timur Filipina untuk kemudian mengarah

ke Asia Timur. Dipastikan biaya asuransi kapal niaga yang melintasi perairan itu juga akan meroket.

Secara teoritis, kekuatan pertahanan Indonesia harus mampu mengamankan kepentingan nasional Indonesia bila pecah konflik di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dapat dicegah dengan upaya meminimalisasi perluasan konflik yang muncul dan mengamankan berbagai ladang gas yang terletak di ZEE Indonesia.<sup>72</sup> Disinilah letak hal yang seharusnya menjadi prioritas perhatian TNI dan TNI AD pada khususnya. Peran TNI AD akan lebih berarti secara signifikan jika dapat mendukung pencapaian ketahanan nasional melalui perwujudan ketahanan energi.

Masih adanya perbedaan prioritas tugas yang dilaksanakan oleh TNI AD guna mendukung kepentingan nasional (national interest) di bidang energi nasional dalam rangka mengantisipasi tren ancaman regional dan global. Dihadapkan dengan pergeseran fokus Amerika Serikat yang beralih dari Timur Tengah ke wilayah Asia, yang ditandai dengan perubahan penempatan militer dari Timur Tengah ke wilayah Asia Pasifik, menunjukkan adanya perubahan perhatian pada kepentingan nasional negara tersebut.<sup>73</sup> Hal ini dikuatkan dengan adanya pendapat ahli bahwa ekspor energi dari wilayah Asia akan mencapai 90 % dari seluruh total nilai ekspor energi dari Timur Tengah pada tahun 2035.<sup>74</sup>

Di sisi lain, peran yang dilakukan TNI AD dalam bidang ketahanan energi, saat ini masih bersifat teknis dan belum terintegrasi dengan kebijakan nasional. Beberapa kegiatan penelitian dan

pengembangan yang dilakukan oleh TNI AD masih belum dimanfaatkan dan ditindak lanjuti untuk menjadi produk massal, seperti pemanfaatan bahan bakar alternatif dari pohon hitaullo, pemanfaatan biodiesel dan gas tabung 3 Kg. Bahkan, hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh TNI AD tersebut belum dipublikasikan sebagai salah satu temuan yang dapat diproduksi secara massal.

Akibat dari beberapa hal diatas, perlu suatu peningkatan peran TNI, termasuk TNI AD, dalam menjaga kepentingan bangsa Indonesia pada level yang lebih tinggi sampai dengan level strategis. Hal ini dilakukan melihat fakta beberapa negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat dan Australia yang menggunakan kekuatan militer mereka sebagai coercive tool dalam mengawal kepentingan nasional negara tersebut di bidang energi. Peningkatan peran ini tentunya memerlukan suatu payung hukum yang spesifik, guna menghindari perbedaan persepsi. Dengan adanya aturan ini pelaksanaan tugas Operasi Militer selain Perang yang ada pada Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004

73 Jeffrey M. Voth, "In Defense of Energy: Unlocking an Untapped Resource," Harvard Kennedy School Review, Vol. XIII, 2013, 66.

74 International Energy Agency, "World Energy Outlook 2012," presentation to the press, London, 12 November 2012 pada Jeffrey M. Voth, "In Defense of Energy: Unlocking an Untapped Resource," Harvard Kennedy School Review, Vol. XIII, 2013, 66.



tentang TNI akan lebih terinci tanpa menghilangkan semangat dan upaya reformasi yang telah dilaksanakan oleh TNI.

### **15. Langkah-Langkah Strategis.**

a. Langkah Strategis dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui program swasembada pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan kerja sama dengan TNI AD, khususnya komando kewilayahan (Kowil) dengan cara melakukan pendampingan dan pengawalan. Hal tersebut dilakukan guna mempercepat tercapainya target swasembada pangan, serta terwujudnya

ketahanan pangan yang mampu memperkokoh ketahanan nasional. Kedua institusi pemerintah tersebut telah membuat aturan pelibatan (rule of engagement) yang implementasinya dilakukan sesuai dengan tataran kewenangan. Kowil sebagai pelaksana lapangan bersinergi dengan organisasi Kementerian Pertanian sesuai dengan tingkatannya. Namun, masih terdapat kendala nyata di lapangan dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.

Berbagai persoalan di lapangan membutuhkan langkah strategis yang dapat dijalankan oleh TNI AD. Langkah tersebut, antara lain, pertama, langkah strategis jangka pendek/tahunan berupa

pembenahan tata kelola niaga pangan. Selain itu, ada pula persoalan penting di luar masalah teknis pertanian, yakni masalah birokrasi.

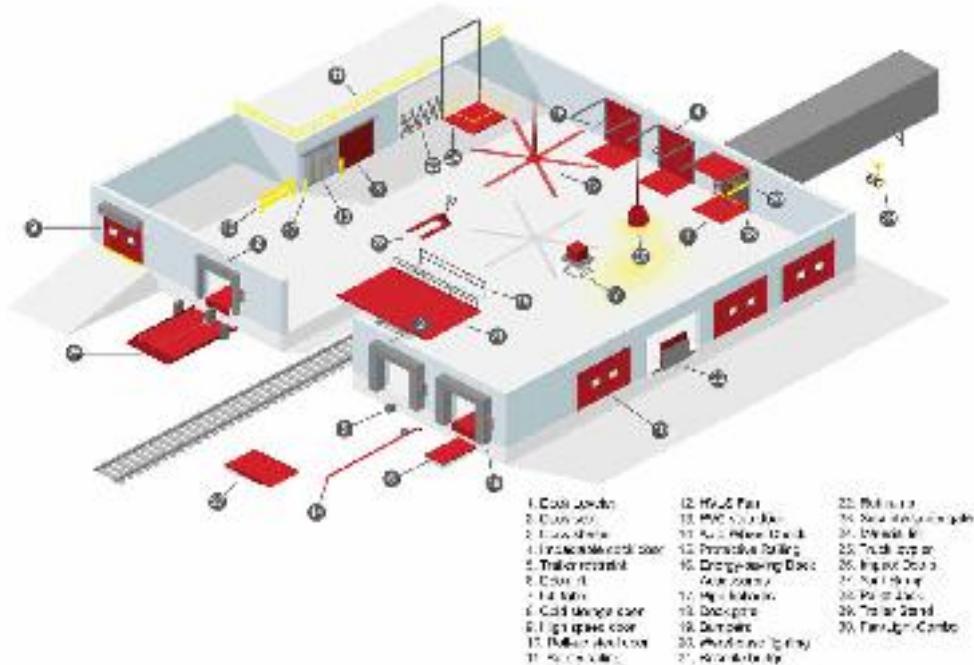
Kedua, langkah strategis jangka panjang. Langkah strategis jangka panjang itu terdiri atas permasalahan lahan pertanian, taraf kehidupan petani, dan permasalahan teknologi pertanian. Persoalan-persoalan tersebut dinilai sangat berpotensi menjadi kendala dalam pencapaian swasembada pangan dan membutuhkan keterlibatan TNI AD. Pendampingan dan pengawalan yang dilaksanakan TNI AD akan tercapai secara maksimal bila diimbangi dengan kebijakan strategis yang sesuai dan dilaksanakan secara simultan. Dibutuhkan peran strategis TNI AD guna memaksimalkan peran yang sudah dilaksanakan. Yaitu peran sesuai dengan pengertian "Peranan" seperti yang diungkapkan oleh Alvin L. Bertran, yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko, bahwa "Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu".<sup>75</sup>

1) Langkah Strategis Jangka Pendek/Tahunan. Langkah strategis jangka pendek/tahunan yang harus segera dijalankan ialah hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola niaga pangan, khususnya beras. Pemerintah selaku pemegang kebijakan negara di bidang ekonomi harus mampu mengendalikan tata kelola niaga pangan karena menyangkut hajat hidup masyarakat Indonesia yang sangat berdampak terhadap ketahanan nasional. Dengan konsumsi beras masyarakat Indonesia yang mencapai sekitar 28 juta ton per tahun, Bulog sebagai lembaga yang membidangi tata kelola niaga beras, saat ini dinilai belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsi sebagai pengendali niaga beras.<sup>76</sup>

Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor. Salah satunya ialah praktik kartel beras atau yang lebih dikenal dengan mafia beras. Permasalahan tersebut bisa mengakibatkan tidak tercapainya target pemerintah dalam menyiapkan cadangan beras nasional sebesar 5 juta ton per tahun. Dengan demikian, muncul wacana pemerintah melakukan impor

<sup>75</sup> Soeleman B.Taneko, "Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial di Indonesia," (Jakarta: 1986), 109.

<sup>76</sup> Esthi Maharani, "Berapa Tingkat Konsumsi Beras Secara Nasional?" *Republika Online*, 21 Maret 2015, diunduh pada 26 Oktober 2015.



beras guna menjaga cadangan beras nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras tahun 2015 ini merupakan produksi tertinggi selama sepuluh tahun terakhir.<sup>77</sup> Namun, Bulog sebagai kepanjangan tangan pemerintah tidak mampu menyerap secara maksimal peningkatan produksi tersebut padahal Bulog memiliki posisi strategis.

Pada saat ini, ketika program swasembada pangan dicanangkan pemerintah, peran Bulog menjadi sangat sentral. Hal itu karena pengelolaan pangan merupakan suatu proses yang utuh, dan manajemen produksi pangan, khususnya beras pascapanen

menjadi persoalan tersendiri yang perlu diselesaikan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan pokok yang dihadapi Bulog. Kendala tersebut, antara lain, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap komoditas beras yang ditetapkan pemerintah, tidak mampu menyaingi harga yang berlaku di pasaran.

Permasalahan lainnya ialah kualitas beras petani Indonesia yang masih rendah. Pada umumnya, hasil di sentra produksi beras Indonesia adalah gabah yang memiliki kadar air cukup tinggi. Perum Bulog sejauh ini belum memiliki infrastruktur pergudangan yang mampu menyimpan gabah dengan

<sup>77</sup> Data Produksi Pertanian BPS, diunduh pada 5 Oktober 2015.

kadar air tinggi, sedangkan para pedagang besar beras di Indonesia saat ini telah memiliki infrastruktur pergudangan untuk mengeringkan gabah/padi yang berkadar air tinggi, sehingga mampu menyerap beras dengan kualitas rendah.

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya ialah HPP yang ditetapkan hanya terikat pada Bulog. HPP tersebut tidak mengikat semua pelaku pasar. Pemerintah tidak memiliki regulasi yang memaksa pasar mengikuti HPP sehingga penentuan mekanisme harga beras tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya pasar oligopolistik atau mekanisme pasar yang dikuasai oleh beberapa pemodal besar yang cenderung dapat menguasai harga.

TNI AD yang dilibatkan dalam program swasembada pangan telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong agar penyerapan beras oleh Bulog dapat dilakukan secara maksimal. Langkah strategis harus dilakukan segera dan TNI AD harus dapat mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna membenahi tata kelola niaga beras secara

bersama-sama. Sementara caranya ialah, pertama, penetapan HPP. Selama ini penetapan HPP hanya diberlakukan secara tunggal yang pada kenyataannya produksi beras sangat beraneka ragam, baik jenis maupun kualitasnya. Penetapan HPP tunggal itu secara ekonomis belum menarik bagi petani untuk menjual berasnya kepada Bulog. Diharapkan agar penetapan HPP bersifat multikualitas dengan mempertimbangkan lokasi dan varietas, sehingga memberikan insentif bagi petani yang memproduksi beras dengan kualitas baik.

Selanjutnya, dalam penetapan HPP, pemerintah juga melibatkan petani atau organisasi petani, mengingat dampak kebijakan itu akan dirasakan semua petani dan seluruh masyarakat Indonesia. Lemahnya keterlibatan tersebut menyebabkan permasalahan beras tidak kunjung dapat diselesaikan sampai saat ini.

Kedua, penguatan institusi Perum Bulog. Melalui Perum Bulog itulah diharapkan pemerintah dapat mengamankan kebijakan di bidang perberasan nasional. Harus ada keseimbangan antara upaya mengamankan pangan



nasional, stabilisasi harga beras, dan kesejahteraan para petani.

Hal penting lainnya ialah perlu dipikirkannya wacana restrukturisasi organisasi Perum Bulog karena secara umum dapat dinilai bahwa badan yang berstatus perusahaan umum itu akan lebih berorientasi pada keuntungan dibandingkan saat Bulog masih menjadi lembaga pemerintah non departemen yang tentunya akan lebih fokus pada pengelolaan pangan demi kepentingan nasional.

Organisasi di kalangan birokrasi tidak sama dengan organisasi militer yang memiliki garis komando jelas. Pada era otonomi daerah saat ini,

saat kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, instruksi dari tingkat pusat sering tidak sampai kepada petugas di lapangan. Sama halnya dengan instruksi dari Kementerian Pertanian belum tentu dilaksanakan dengan baik oleh petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai ujung tombak program yang berhadapan dengan petani.

Pengaruh politik dalam masalah ini cukup besar karena Kepala Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kurang memiliki hubungan organisasional yang kuat dengan Menteri Pertanian. Pengaruh politik dalam birokrasi telah membuat para Kepala Dinas

Pertanian lebih "takut dan loyal" kepada seorang gubernur dan bupati/wali kota, daripada kepada Menteri Pertanian karena mereka memang diangkat oleh gubernur dan bupati/wali kota.

Selain itu beberapa program seperti GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan), landreform dan transmigrasi, sebetulnya dapat mendukung program swasembada pangan, bila program-program ini telah terintegrasi dan dikelola dalam satu lembaga. Oleh karena itu TNI AD dapat mendorong pemerintah untuk melakukan penguatan wewenang satu lembaga yang sudah ada yaitu Dewan Ketahanan Nasional. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat menyinergikan program-program tersebut diatas untuk mendukung program swasembada pangan yang telah dicanangkan.

2) Langkah strategis jangka panjang. Lahan Pertanian. Luas lahan pertanian merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap realisasi swasembada pangan. Permasalahan pokok lahan pertanian di Indonesia ialah penyusutan lahan

pertanian. Salah satu penyebab diberlakukannya impor pangan di Indonesia, khususnya beras, jagung, dan kedelai, karena terdapat kecenderungan terjadinya percepatan konversi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Sejak dicanangkannya program swasembada pangan oleh pemerintah dan dilibatkannya TNI AD, pada awal tahun 2015 telah terjadi pertambahan luas tanam lahan pertanian sebesar 114.134 ha.<sup>78</sup>

Namun, upaya tersebut belum dapat secara maksimal memenuhi kebutuhan komoditas pangan dalam negeri apabila dihadapkan dengan target swasembada pangan pada tahun 2017. Pemerintah masih harus melakukan impor komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Penurunan luas lahan pertanian produktif, khususnya di Jawa dan Bali, terjadi akibat konversi status lahan bagi peruntukan pembangunan lainnya yang merupakan ancaman sangat serius terhadap produksi pertanian. Jika permasalahan ketersediaan lahan dan penyusutan lahan, khususnya persawahan, tidak

---

<sup>78</sup> Laporan Realisasi Luas Tanam Berdasarkan Pj Provinsi Melalui Lo PSP Sterad Agustus 2015.



diatasi secara komprehensif, akan terjadi inkonsistensi peningkatan produksi padi. Diperlukan suatu sinergi antara TNI AD dan pemerintah pada tingkat strategis guna merumuskan solusi atas permasalahan tersebut.

Lahan pertanian di Indonesia yang mengalami penyusutan mencapai 100.000 hektare per tahun dan pada tahun 2009 pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.<sup>79</sup> Klausul dalam undang-undang tersebut secara jelas menggambarkan proteksi ketat terhadap kegiatan konversi lahan pertanian, tetapi

menurut kenyataan di lapangan, pemberlakuan undang-undang tersebut belum diimplementasikan secara maksimal.

Pada tahun 2007 ada program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Sebenarnya program itu sudah ditetapkan pemerintah sejak tahun 2003, tetapi digalakkan kembali oleh pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun-tahun awal, program itu terlaksana dengan sangat baik dan konsisten. Namun, seiring berjalannya waktu dan berakhirnya MoU antara TNI AD dan Kementerian Kehutanan pada 2008, program tersebut dirasakan tidak lagi menjadi perhatian khusus dan cenderung stagnan. Berkaitan dengan pencanangan



program swasembada pangan pada era pemerintahan Presiden RI Ir. Joko Widodo, program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) memiliki korelasi yang signifikan untuk mendukung swasembada pangan.

Kedua faktor tersebut merefeksikan bahwa pencegahan penyusutan hutan dan lahan pertanian bukanlah hal sulit. Harus ada suatu formulasi strategis yang diperankan oleh pemangku kepentingan untuk mengoordinasikan program tersebut secara konstruktif guna mendukung program swasembada pangan. TNI AD sebagai institusi yang dilibatkan oleh pemerintah dalam program swasembada pangan harus dapat berperan sebagai koordinator dan fasilitator. Dalam nota kesepahaman, TNI AD

lebih fokus pada pendampingan dan pengawalan. Namun, jika program pencegahan penyusutan hutan dan lahan pertanian tidak dilaksanakan secara simultan, tujuan utama swasembada pangan nasional secara berkelanjutan akan sulit dicapai.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan TNI AD dari perspektif strategis dalam pencegahan penyusutan hutan dan lahan ialah, pertama, Markas Besar TNI AD pada tingkat strategis harus dapat membuat kajian khusus untuk memberi masukan kepada kementerian terkait (Menko Kesra dan Menteri Kehutanan) agar merumuskan satu program baru, yakni program yang mengintegrasikan GNRHL dengan program swasembada pangan. Kedua, selain payung hukum yang

sudah ada, yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 dan Perpres No. 89 Tahun 2007 tentang GNRHL, kegiatan sinkronisasi dua program tersebut harus tertuang dalam suatu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan nota kesepahaman antarlembaga terkait. Ketiga, yang terpenting pada level taktis diharapkan peran serta satuan-satuan jajaran TNI AD sebagai pelopor kegiatan tersebut.

Permasalahan taraf kehidupan petani. Yang dimaksud taraf kehidupan petani di Indonesia ialah permasalahan pokok yang berhubungan dengan persoalan buruh tani dan rumah tangga petani. Kedua permasalahan tersebut berdampak terhadap penurunan jumlah tenaga kerja pertanian. Rata-rata setiap tahun ada 500.000 petani yang beralih profesi.<sup>80</sup> Penyusutan jumlah pekerja di bidang pertanian ini akan berlangsung dari tahun ke tahun. Hal ini akibat rendahnya pendapatan dibandingkan dengan tingginya energi yang terkuras, serta tawaran penghasilan yang lebih baik dengan menjadi buruh di perkotaan.

<sup>80</sup> Iris Gera, BPS: Jumlah Petani di Indonesia Terus Berkurang, "Voice Of America," 2 Juli 2014, diunduh pada 26 Oktober 2015 <http://www.voaindonesia.com/content/bps-jumlah-petani-di-indonesia-terus-berkurang/1949152.html>.

Penyusutan tersebut secara otomatis akan memengaruhi faktor produksi pertanian dan menjadi kendala serius dalam program swasembada pangan. Permasalahan buruh tani miskin di Indonesia harus dapat ditangani dengan baik. Jika permasalahan buruh tani miskin di Indonesia tidak dikelola dengan baik, hal itu akan berdampak langsung terhadap penurunan jumlah pekerja di bidang pertanian.

Kementerian Pertanian dengan dukungan TNI AD dalam program swasembada pangan juga harus membuat suatu terobosan strategis guna meningkatkan kesejahteraan buruh tani dan rumah tangga petani. Sebagai pendukung program swasembada pangan, TNI AD memiliki posisi strategis untuk mendorong para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan petani. Untuk persoalan buruh tani, salah satu upaya strategis yang diperlukan ialah mendorong program transmigrasi. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, transmigrasi dilaksanakan dengan paradigma baru.

Saat ini, transmigrasi bukan lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan juga upaya untuk mengembangkan wilayah.<sup>81</sup> Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Jakarta, tetapi berdasarkan kerja sama antardaerah pengiriman transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Dapat disimpulkan bahwa program transmigrasi merupakan langkah strategis yang saling mendukung bila dilakukan secara terpadu dengan program

s w a s e m b a d a pangan. Meskipun transmigrasi merupakan program yang bersifat jangka panjang, tetapi sangat efektif untuk mendukung program lainnya, khususnya pertanian, terlebih lagi program itu juga sangat efektif dilihat dari perspektif pertahanan. TNI AD harus berperan dengan cara mendorong pemerintah menyinergikan program transmigrasi dengan program swasembada pangan yang diwadahi dalam suatu nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian

dan Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada tingkat operasional dan taktis, TNI AD juga dapat melakukan kegiatan pengawalan dan pendampingan program transmigrasi tersebut.

Selain soal buruh tani, permasalahan rumah tangga petani juga menjadi sangat krusial dalam pencapaian program swasembada pangan. Indonesia adalah negara agraris dengan potensi pertanian yang luar

biasa. Sepatutnya negara

**Teknologi memegang peran penting dalam pengembangan potensi sumber daya tanaman pangan**

ini maju dalam bidang pertanian, tetapi faktanya jumlah keluarga petani mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Fenomena penurunan jumlah rumah tangga petani tentunya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan petani. Tingkat pendapatan petani yang rendah umumnya disebabkan oleh rendahnya nisbah (rasio) kepemilikan lahan para petani Indonesia.

Data statistik menunjukkan bahwa nisbah kepemilikan lahan pertanian di Pulau Jawa hanya 0,14 hektare per KK (kepala keluarga), sedangkan di luar Pulau Jawa hanya 2,2 hektare

<sup>81</sup> Willy Soeratno, "Transmigrasi dan Tantangan ke Depan," (Bogor: Pustaka Rakyat, 2012), 34.

per KK. Secara sederhana, dapat dianalisis bahwa kepemilikan lahan yang ekonomis minimal 2 hektare di Jawa dan 10 hektare di luar Jawa.<sup>82</sup> Kepemilikan lahan yang kecil tersebut menandakan bahwa sulit meningkatkan taraf kehidupan ekonomi para petani. Pekerjaan petani pun dianggap sangat tidak menguntungkan dan tidak memberikan harapan untuk memperbaiki taraf hidup. Pada kondisi itu, mampukah petani kita berproduksi dengan maksimal atau memenuhi target pemerintah dalam rangka swasembada pangan?

#### Program "Landreform".

Program ini pernah dicoba diimplementasikan di Indonesia pada dekade 1960-an meskipun hanya mencakup luasan tanah dan petani penerima dalam jumlah yang sangat terbatas. Kemudian sepanjang pemerintahan Orde Baru, landreform (reformasi pertanahan) tidak pernah diprogramkan secara terbuka, tetapi diganti dengan pembuatan sertifikat, transmigrasi, dan pengembangan perkebunan inti rakyat yang pada hakikatnya

bertujuan memperbaiki akses masyarakat terhadap tanah. Sepanjang era reformasi telah dicapai beberapa perbaikan dalam hukum dan perundang-undangan keagrariaan, tetapi wujud nyata program landreform belum tercapai. Landreform kembali masuk dalam program penting pembaruan agraria, seperti disebutkan dalam Pasal 5 Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 bahwa salah satu arah kebijakan pembaruan agraria ialah, pertama, menata kembali penggunaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah oleh rakyat.

Kedua, menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penggunaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform. Tantangan dan hambatan yang menjadi kendala dalam program landreform cukup kompleks, menyangkut berbagai aspek, khususnya masalah politik.<sup>83</sup>

82 Ariane Meida, "Kepemilikan Lahan Petani Makin Sempit, Mana Janji SBY", *Kompas.com*, 23 September 2013 Diunduh pada 26 Oktober 2015. <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/23/1622077/Kepemilikan.Lahan.Petani.Makin.Sempit>.

83 Bahari Syaiful, "Landreform Indonesia, Tantangan dan Prospeknya," (Jogjakarta: 2015, Gajahmadapress), 25.

Peluang yang realistik saat ini ialah melaksanakan program landreform secara terbatas, yakni untuk wilayah-wilayah yang tekanan penduduk dan konflik pertanahannya masih ringan, terutama di luar Pulau Jawa.

Peran TNI AD sangat dibutuhkan guna menghadapi kondisi tersebut di atas. Perlu adanya kebijakan yang bersinergi dengan program lainnya pada level strategis, misalnya dengan menggandeng instansi terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan. TNI AD harus dapat menyinergikan program swasembada pangan dengan program landreform, dengan cara menggandeng dua kementerian. Sinergi kedua program tersebut harus dituangkan dalam suatu pola kerja sama yang dipelopori dan difasilitasi oleh TNI AD.

Secara harfiah, pengertian terminologi "teknologi pertanian" itu beragam. Namun, dapat kita artikan bahwa teknologi pertanian merupakan penerapan prinsip-prinsip teknologi dalam penggarapan lahan pertanian. Teknologi memegang peran penting dalam pengembangan potensi sumber daya tanaman

pangan. Teknologi akan kurang bermanfaat apabila tidak diaplikasikan, terutama dalam upaya meningkatkan produksi pertanian dan pemberdayaan masyarakat tani.

Berbagai jenis teknologi pertanian dikembangkan, mulai dari teknologi benih yang menghasilkan benih unggul, teknologi pemupukan yang menghasilkan urea tablet, teknologi pengendalian hama dan penyakit, termasuk teknologi pengembangan mesin pertanian dan pascapanen. Kontribusi teknologi pertanian sangat nyata terhadap peningkatan produksi dan perbaikan kesejahteraan petani. Sebenarnya Indonesia bukanlah negara yang tertinggal di bidang teknologi pertanian. Permasalahan pokoknya ialah penerapan teknologi pertanian itu dianggap belum maksimal dan belum memasyarakat di kalangan petani. Banyak petani yang belum dapat mengakses informasi tentang program-program pemerintah di bidang teknologi pertanian.

Dibutuhkan kebijakan strategis guna menerapkan unsur teknologi tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi melalui program



Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah dilaksanakan ialah program internet masuk desa. Dengan memanfaatkan jaringan daring (online), sosialisasi beserta implementasi teknologi pertanian dan program pertanian pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal sampai ke tingkat desa di seluruh Indonesia.

TNI AD harus dapat menginisiasi sinergi program internet masuk desa Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan program swasembada pangan Kementerian Pertanian. Pada level strategis, sinergi tersebut harus diwadahi oleh nota kesepahaman (MoU). Pada level operasional, Mabes TNI AD dan kementerian terkait merumuskan implementasinya sampai ke tingkat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Pada level pelaksanaan, dapat dilakukan pendampingan dan pengawalan oleh satuan komando wilayah (Satkowil) seperti yang telah diterapkan pada program swasembada pangan.

Selain itu, dengan kemampuan Zeni yang dimiliki TNI AD, seharusnya dapat meningkatkan infrastruktur petani khususnya di bidang pengadaan irigasi teknis. Ketersediaan irigasi menjadi sentral kaitannya dengan keberlangsungan produksi pertanian. Tentunya hal ini tidak dapat dilakukan semata-mata oleh TNI AD semata. Perlu dukungan dan kerjasama dengan berbagai kalangan khususnya Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum serta pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

b. Langkah Strategis dalam mewujudkan Ketahanan Energi Nasional.

Mengacu pada dinamika lingkungan strategis bidang ketahanan energi, maka peran TNI AD dalam ketahanan energi perlu mendapat perhatian secara khusus. Hal ini juga berpedoman pada aplikasi penggunaan kekuatan militer oleh beberapa negara dalam mengamankan sumber dan jalur distribusi energi mereka. Tentunya hal ini memerlukan langkah strategis yang bersifat nasional dan komprehensif dalam mewujudkannya.

1) TNI AD Mendorong Kampanye tentang Pola Konsumsi Energi Nasional. Indonesia, saat ini, hanya mengandalkan peran Pertamina dalam penyediaan energi minyak dan belum memiliki langkah strategis yang disiapkan untuk mengantisipasi hal tersebut. Penyediaan cadangan energi nasional tidak terlepas dari peran pemerintah. Pertamina mengklaim memiliki roadmap untuk meningkatkan kemampuan kebutuhan energi BBM bagi masyarakat, termasuk cadangannya. Akan tetapi, Pertamina tentu tidak dapat berjalan secara independen.

Tingginya harga minyak dalam negeri dan posisi net importir minyak menciptakan krisis energi nasional.

Situasi tersebut harus dapat diatasi melalui program ketahanan energi nasional yang saat ini sedang digadangkan. Ketahanan tersebut meliputi: kemampuan menyediakan dalam jumlah cukup untuk kurun waktu tertentu; harga terjangkau oleh kemampuan masyarakat; tahan dan tidak mudah terpengaruh oleh gejolak lokal, regional maupun internasional; memiliki kemandirian di dalam pengelolaan, meliputi, managemen, teknologi, transportasi dan pendistribusian; memiliki kemampuan finansial setiap keadaan; dan memiliki sarana infratsruktur yang cukup.

Langkah tersebut akan sia-sia bila tidak didukung oleh seluruh stakeholder dan komponen nasional lainnya. Peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan energi nasional diharapkan mampu melaksanakan upaya sebagai berikut: penataan regulasi penggunaan energi sektor Migas yang hemat dan efisien, peningkatan kualitas produksi dan kebijakan tidak mengimpor dalam



produk mentah; manajemen energi yang berkelanjutan dan terukur, serta menjamin kebutuhan energi nasional; pemenuhan infrastruktur yang memadai; dan pengembangan teknologi yang berkesinambungan.

Upaya tersebut perlu menentukan sasaran dalam kebijakan pemerintah terhadap cadangan strategis nasional berupa: mengubah paradigma pengelolaan energi sebagai modal pembangunan nasional; meningkatkan efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi; meningkatkan pangsa sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional; meningkatkan cadangan terbukti energi fosil dan mengurangi pangannya dalam bauran energi nasional; meningkatkan

kemandirian pengelolaan energi, penciptaan lapangan kerja, kemampuan penelitian, pengembangan dan penerapan (Litbangrap), dan peranan industri dan jasa energi dalam negeri; pemerataan akses masyarakat terhadap energi; pengamanan pasokan energi, khususnya listrik dan Migas; mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi dalam pembangunan ekonomi nasional; dan menetapkan dan mengamankan cadangan penyangga energi nasional.

Seluruh upaya tersebut dapat didukung oleh TNI, khususnya TNI AD dengan mengaplikasikan strategi Pembinaan Teritorial dengan fokus pada kampanye pola konsumsi energi kepada internal organisasi TNI dan masyarakat. Tentunya langkah kampanye ini

perlu mendapat dukungan baik dari sisi legalitas maupun institusi yang menjadi leading unit. Legalitas dan institusi tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi payung bagi satuan-satuan TNI dalam melaksanakan tugas OMSP yang

Bumi dan Batubara. Energi sumber daya alam Migas, sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Hal demikian sangat berarti untuk pertumbuhan ekonomi nasional, karena keterkaitannya dengan



dimilikinya.

2) TNI AD Mendorong Pemerintah dan Berperan Aktif dalam Pengelolaan Energi Gas

penerimaan negara, ekspor Migas serta seluruh neraca pembayarannya. Keterkaitan itu sebenarnya dapat dilihat secara signifikan dan empiris dari

peristiwa-peristiwa krisis ekonomi global dalam beberapa tahun yang lalu dan berlangsung hingga kini, karena krisis energi dunia.

Penggunaan kekuatan militer dalam rangka mengamankan kepentingan nasional (national interest) khususnya pada sumber-sumber energi nasional serta jalur-jalur ekonomi energi (sea lines of communication) menjadi sangat vital. Sama seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain, kekuatan militer digunakan sebagai langkah keras (coercive power) untuk mengamankan kepentingan ekonomi negara tersebut. Termasuk didalamnya, kekuatan militer digunakan sebagai langkah antisipatif terhadap kegiatan-kegiatan ilegal yang dapat merugikan negara. Hal inilah yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Australia dalam mengamankan jalur distribusi energi mereka.

Pembuat kebijakan seharusnya merancang suatu bentuk aturan perundangan, termasuk aturan pelaksana bagi TNI, tentang wilayah kerja, sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Migas. Saat ini,

legalitas penggunaan kekuatan TNI masih pada level Peraturan Menteri Pertahanan yang belum dijabarkan serta belum mengatur secara spesifik tentang aturan seperti yang dimaksud diatas. Pelaksanaannya akan mudah dilakukan dengan pemantauan, terhadap manfaat dari perspektif perekonomian dan penghasilan devisa negara, terlebih negara dapat mengontrol, karena pemberi izin dapat sewaktu-waktu mencabutnya, bilamana tidak sesuai dengan penggunaannya. Hal demikian sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945, yang sangat berfungsi sosial, dalam upaya percepatan kesejahteraan negara, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Sekitar 16% total supply energi primer dari gas bumi semakin tumbuh permintaannya. Indonesia telah menjadi aktor utama dalam LNG global sejak tahun 1977 dan merupakan pengekspor terbesar LNG lebih dari 3 dekade. Kondisi tersebut bukan berarti gas bumi nasional menjadi sektor utama dalam menyokong pemenuhan kebutuhan energi nasional, namun harus dikelola secara berimbang dengan sektor lainnya.



Selain gas bumi, Indonesia menjadi pengekspor terbesar batubara dunia, khususnya ke Tiongkok dan India. Dalam pengelolaan batubara harus memiliki konsep pengawasan secara ketat, mengingat masih terdapat pengelolaan batubara secara ilegal di beberapa daerah yang dieksport ke luar negeri. Banyaknya jumlah aktivitas pertambangan batubara ilegal merupakan ekses dari penyerahan izin batubara ke daerah. Akhirnya menimbulkan tumpang tindih lahan dengan perusahaan yang memiliki izin dari pemerintah pusat.

Peran TNI AD sebagai coercive tool dalam rangka mendukung kepentingan nasional, khususnya di bidang energi ini dinilai dapat

memberikan efek penggentar (deterrence effect) bagi pelaku usaha ilegal, maupun negara lain. Tentunya hal ini harus dikuatkan dengan suatu keputusan politis nasional dalam bentuk aturan secara legal formal.

3) TNI AD Ikut Berperan Serta dan Mendorong Pemanfaatan Keanekaragaman EBT. Pemanfaatan keberagaman EBT nasional tergantung keynote dari kemauan politik (political will), kebijakanyang cerdas (smart policy), dan etos kerja. Pemanfaatan EBT masih rendah berkisar 6% pada tahun 2011, memerlukan program konservasi dan diversifikasi energi yang ditopang oleh ketahanan energi dan kemandirian energi akan meningkatkan kedaulatan energi.

Kondisi tersebut pada gilirannya akan terwujud bila program tersebut terealisasi dengan baik.

Ketahanan energi secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan untuk merespon dari dinamika energi global dan kemampuan menjamin ketersediaan energi dengan harga yang wajar. Ketahanan energi nasional harus dipandang sebagai proses yang dinamis dan berkelanjutan. Hal tersebut harus ditopang oleh energi berbasis bahan baku fosil yang terbatas jumlahnya dan kemungkinan akan habis. Pemanfaatan EBT harus segera direalisasikan sehingga pemakaian energi fosil dan EBT semakin seimbang.

Salah satu keunggulan penggunaan EBT adalah tidak menimbulkan dampak eksternal yang akan mempercepat global warming. Hal ini sejalan dengan konvensi internasional yang ikut secara aktif menjaga kebersihan udara dunia. Pengembangan EBT juga merupakan penjabaran kebijakan yang berwawasan lingkungan sesuai Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi

Nasional. Selain itu, eksplorasi EBT adalah suatu proses produksi yang berkelanjutan, sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan kehabisan sumbernya. Proses produksi seperti ini dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif karena dapat dilakukan secara berklaster dari skala kecil, menengah sampai besar.

Indonesia tidak termasuk dalam kategori negara yang kaya sumber fosil. Cadangan per kapita minyak, gas dan batubara Indonesia berada di bawah cadangan per kapita rata-rata dunia. Penggunaan EBT nasional masih relatif sangat kecil. Para investor dan pelobi teknologi hijau mengeluhkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah negara-negara di dunia lebih besar terhadap pemanfaatan energi fosil. Hal tersebut dinilai tidak adil oleh para investor, mengingat pemerintah tidak mengurangi subsidi pada energi fosil. Walaupun para investor EBT saat ini mulai lebih mampu untuk mengembangkan teknologi sendiri, persaingan tidak seimbang dibanding dengan pelaku investasi energi fosil. Padahal dengan teknologi EBT yang semakin murah, pemerintah akan mulai mengurangi penggunaan energi

fosil serta mengembangkan EBT secara intensif.

Pengembangan EBT nasional harus disusun dalam skala prioritas untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan energi. Prioritas pengembangan tersebut dapat diwujudkan dengan mengamankan pasokan baru dan penurunan emisi karbon, walaupun Indonesia masih rendah. Upaya ini juga dapat dilaksanakan dengan mengembangkan EBT yang mampu mensubsidi penggunaan energi fosil, khususnya BBM. Sumber EBT yang tersedia dikembangkan di tempat yang membutuhkan energi mulai dari skala yang besar dan baseload. Dalam pengelolaannya, harus memperhatikan karakteristik, sehingga perlu dijadikan dalam pengembangan EBT adalah geothermal, hidro, dan biomassa. Selain itu, dengan mengintegrasikan pengelolaan sampah melalui pengembangan energi biomassa secara terprogram dan terarah. Pada pengembangan energi laut, dapat diprioritaskan dengan membangun pilot project dan melakukan riset lapangan.

Beberapa riset lapangan yang dilaksanakan oleh TNI dapat dijadikan pilot project bagi masyarakat dan pemerintah. Tentunya hal ini memerlukan sinergitas pada level internal TNI khususnya dalam hal eksplorasi informasi dalam rangka kampanye. Kampanye TNI dalam bidang pengembangan EBT jika didukung oleh dislokasi organisasi TNI yang tersebar di seluruh Indonesia, akan mempercepat program pemerintah tersebut. Selain itu, penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh TNI dapat pula dijadikan langkah alternatif untuk mengurangi konsumsi energi tak terbarukan akibat aktivitas latihan maupun operasi militer TNI.

*Beberapa riset lapangan  
yang dilaksanakan oleh  
TNI dapat dijadikan pilot  
project bagi masyarakat  
dan pemerintah*



## BAB V PENUTUP

### 16. Kesimpulan.

Sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang temaktub dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AD mempunyai hak dan kewajiban untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang termasuk bidang pangan dan energi. Peran TNI AD dibutuhkan dalam rangka membantu pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi yang berkontribusi langsung terhadap stabilitas nasional dan ketahanan

nasional secara utuh. Salah satu keuntungan yang dimiliki oleh TNI AD sebagai organisasi ialah dislokasi pasukan yang tersebar di seluruh penjuru tanah air yang dapat menjamin totalitas dukungan yang diberikan kepada pemerintah mulai dari tingkat pemerintahan pusat sampai dengan daerah. Wujud tugas tersebut dilaksanakan melalui fungsi teritorial TNI AD melalui penyiapan ruang, alat dan kondisi juang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional dalam rangka pertahanan semesta, sebagai bagian dari Program Kerja dan Anggaran TNI AD Bidang Teritorial.

Pembahasan kajian ini meliputi



pengaruh ketahanan pangan dan energi dalam mewujudkan ketahanan nasional serta urgensi peran TNI AD dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional.

Kemajuan informasi dan teknologi mengakibatkan terjadinya pergeseran def nisi keamanan pada tataran global. Barry Gordon Buzan mengungkapkan sebuah teori bahwa keamanan suatu negara tergantung dari kemampuan negara tersebut dalam menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya.<sup>84</sup> Krisis pangan dan energi telah menjelma sebagai salah satu ancaman serius

bagi kemaslahatan umat manusia dan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas geopolitik dunia.

Data statistik menunjukkan bahwa keadaan Indonesia masih jauh dari kondisi tahan pangan dan energi. Sejumlah komoditas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia masih harus diimpor dari luar negeri. FAO bahkan menggolongkan Indonesia sebagai negara yang rawan akan krisis pangan. Demikian juga dengan pemenuhan kebutuhan energi nasional yang masih mengandalkan negara lain sebagai sumber energi. Indonesia berubah dari negara penghasil minyak menjadi negara

<sup>84</sup> Barry Buzan, "Ole Wæver dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*," (Copenhagen: School of Security Studies, 1997), hlm 89.

pengimpor minyak, yang dibuktikan dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan Organisasi Negara-negara Penghasil Minyak Bumi (OPEC). Kondisi rawan akan krisis pangan dan energi ini dapat menyeret Indonesia ke instabilitas dalam negeri yang pada akhirnya dapat membahayakan ketahanan nasional.

Menyadari kondisi tersebut, TNI AD secara aktif mendukung upaya pemerintah dalam rangka mencapai ketahanan pangan dan energi nasional. Dalam hal ketahanan pangan, TNI AD bekerjasama dengan Kementerian dan membuat nota kesepahaman (MoU) antara Kepala Staf Angkatan Darat dan Menteri Pertanian yang ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2015. MoU ini kemudian dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pangan Kementerian Pertanian dengan Asisten Teritorial Kasad.<sup>85</sup> Pelibatan prajurit TNI AD dalam program swasembada pangan dikhususkan pada peningkatan produksi pertanian yang

implementasinya dilakukan melalui pelaksanaan pendampingan dan pengawalan. Program ini dilakukan oleh satuan teritorial dari tingkat Kodam sampai dengan Koramil.

Kegiatan lainnya yang telah dilakukan TNI AD untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam rangka ketahanan pangan antara lain gerakan reboisasi hutan dan lahan, atau yang lebih dikenal dengan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL). Selain menanam kembali hutan, kegiatan lain dalam program ini adalah pemanfaatan lahan tidur untuk sebagai lahan pertanian. Program GNRHL dilakukan sejak 2003 sampai dengan 2008.

Namun, berbeda dengan bidang pangan, peran TNI AD dalam bidang energi masih sangat minim. TNI AD memegang peran yang cukup penting sejak awal negara ini berdiri. Cikal bakal Pertamina dimulai pada 1957 dengan penunjukan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada waktu itu, Jenderal A.H. Nasution, sebagai Presiden Direktur PT. Pertambangan Minyak Nasional

<sup>85</sup> Perjanjian Kerjasama Dirjen Prasarana dan Sarana pertanian, Kementerian Pertanian RI dengan Aster Kasad Nomor 06/SR.120/b.1/01/2015 tanggal 2 Januari 2015.

Indonesia (P.T. PERMINA). Setelah era pembentukan tersebut, peran TNI AD di bidang energi sangat minim.

Dewasa ini, TNI AD mulai berperan kembali dalam bidang energi namun terbatas pada bidang penelitian dan pengembangan dalam menemukan energi alternatif serta mendorong pola konsumsi energi yang efisien dan efektif. Beberapa contoh adalah program pemanfaatan tumbuhan Hitaullo (*Calophyllum Inophyllum L.*) sebagai sumber bahan bakar alternatif, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sterdam III/Siliwangi, penggunaan biodiesel bagi kendaraan tempur dan pemanfaatan gas tabung 3 kg sebagai bahan bakar kendaraan bermotor.

## 17. Rekomendasi.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional menjadi salah satu tantangan tugas TNI AD khususnya dalam bidang operasi militer selain perang. Hal ini penting dikaitkan dengan stabilitas nasional yang bermuara pada ketahanan nasional. Program-program TNI AD sebagaimana yang telah dijelaskan di atas

harus diimbangi dengan langkah strategis lain, misalnya dengan menyinergikan kebijakan-kebijakan lainnya di tingkat kementerian. Sinergi yang dikoordinasikan TNI AD itu bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Oleh karena itu, untuk mencapai efektivitas pelaksanaan tugas, disarankan:

Pertama, diperlukan adanya penguatan lembaga Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Penguatan tersebut bertujuan menyederhanakan birokrasi dan memberikan kewenangan kepada Wantannas untuk menyinergikan lembaga-lembaga yang terkait dalam program-program ketahanan pangan dan energi nasional sehingga langkah-langkah strategis yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik.

Alasan utama dibalik saran ini adalah perlu adanya sebuah organisasi yang mengkoordinir semua pemangku kepentingan dengan kewenangan yang besar sehingga bisa mengurai kemacetan-kemacetan birokrasi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional. Pemilihan Wantannas sebagai organisasi yang

dianggap mampu melaksanakan tugas ini bukan tidak beralasan. Melihat keanggotaan Wantannas saat ini maka sesungguhnya organisasi ini mempunyai potensi yang besar.

Penguatan Wantannas yang dimaksud ialah merevisi keanggotaan Wantannas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan bidang pangan dan energi. Saat ini, Kementerian yang menjadi Anggota Inti Wantannas sesuai Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Adanya pergeseran def nisi keamanan sebagaimana yang dijelaskan diatas juga menjadi alasan pendukung saran penguatan Wantannas ini. Dengan adanya

pergeseran def nisi keamanan maka isu-isu seperti krisis pangan, krisis energi, perubahan cuaca dan dampak lingkungan bukan lagi milik sektoral tapi menjadi isu bersama yang memerlukan penanganan bersama pula. Bangsa Indonesia dapat dikatakan aman apabila rakyatnya hidup dengan tenang dan damai, tersedia bahan pangan dan energi yang cukup, terhindar dari bahaya pemanasan global dan dampak lingkungan lainnya, terhindar dari bahaya bencana alam, dan berbagai kondisi ideal lainnya. Tentu saja untuk mewujudkan hal ini perlu kerja sama seluruh unsur-unsur yang ada. Sebagai contoh, krisis pangan dan energi bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM saja, tetapi juga seluruh komponen bangsa Indonesia. Namun, apabila tidak disinergikan melalui suatu organisasi khusus maka upaya mewujudkan ketahanan pangan dan energi ini tidak akan efektif dan efisien.

Kedua, dibutuhkan suatu payung hukum sebagai dasar legalitas TNI AD untuk mengimplementasikan tugas-tugas tersebut. Payung hukum yang dimaksud ialah aturan

setingkat peraturan pemerintah, yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, khususnya Pasal 7 tentang tugas operasi militer selain perang. TNI tidak dapat mengandalkan MoU yang selama ini dibuat karena hanya bersifat kesepakatan antara Kementerian dengan TNI AD, dan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat.

Aturan pelaksana yang dimaksud harus memuat dengan jelas sejauh mana keterlibatan TNI AD dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan energi, termasuk dalam hal ini adalah kewenangan TNI. Aturan pelaksana ini juga harus dapat menjawab pertanyaan tentang peran TNI AD; apakah dapat bersifat strategis pada tataran ikut menentukan kebijakan nasional yang berkaitan dengan upaya tersebut, atau hanya pada tingkat operasional dan taktis dengan mendukung pelaksanaan program di lapangan.

Peran TNI AD pada level strategis yang dimaksud contohnya adalah keikutsertaan TNI dalam menentukan kebijakan nasional di bidang pangan dan energi, bersama dengan pemangku

kebijakan lainnya, dalam wadah Dewan Ketahanan Nasional. Keikutsertaan TNI tersebut untuk memberikan masukan dari sudut pandang pertahanan dalam rangka perwujudan ketahanan pangan dan energi yang sangat berpengaruh pada stabilitas nasional. Selain itu, keikutsertaan tersebut juga dalam rangka mengamankan kepentingan

TNI dari segi dukungan logistik untuk kepentingan operasi militer, baik untuk perang maupun selain perang.

Pada level operasional, TNI diharapkan dapat diperankan secara aktif dalam mengawal kepentingan negara, khususnya di bidang pangan dan energi. Penggerahan kekuatan TNI ini diharapkan dapat menjadi efek penggentar bagi pihak lain (state dan non-state actor), seperti yang dilaksanakan oleh beberapa negara lain dalam mengamankan sumber dan jalur distribusi sumber daya negara tersebut. Selain itu, peran TNI pada level operasional ini akan menciptakan efek tangkal bagi kemungkinan kegiatan eksplorasi ilegal terhadap sumber daya alam dan pangan yang dapat merugikan negara.

Dengan adanya aturan pelaksana ini maka harapan selanjutnya ialah dukungan anggaran yang memadai untuk menyukseskan upaya tersebut. Selama ini anggaran yang dikeluarkan oleh TNI AD merupakan anggaran organisasi TNI AD sendiri sehingga pelaksanaan program-program masih sangat terbatas sesuai kemampuan anggaran. Apabila upaya pewujudan ketahanan pangan dan energi ini menjadi upaya nasional maka diharapkan adanya anggaran khusus pemerintah kepada semua pemangku kepentingan sehingga dapat memaksimalkan upaya masing-masing sesuai bidangnya.

Akhirnya, ditinjau dari segi hukum, dengan adanya aturan pelaksana tersebut diharapkan TNI AD secara legal formal dapat melaksanakan tugas-tugas dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan energi dengan lebih baik.

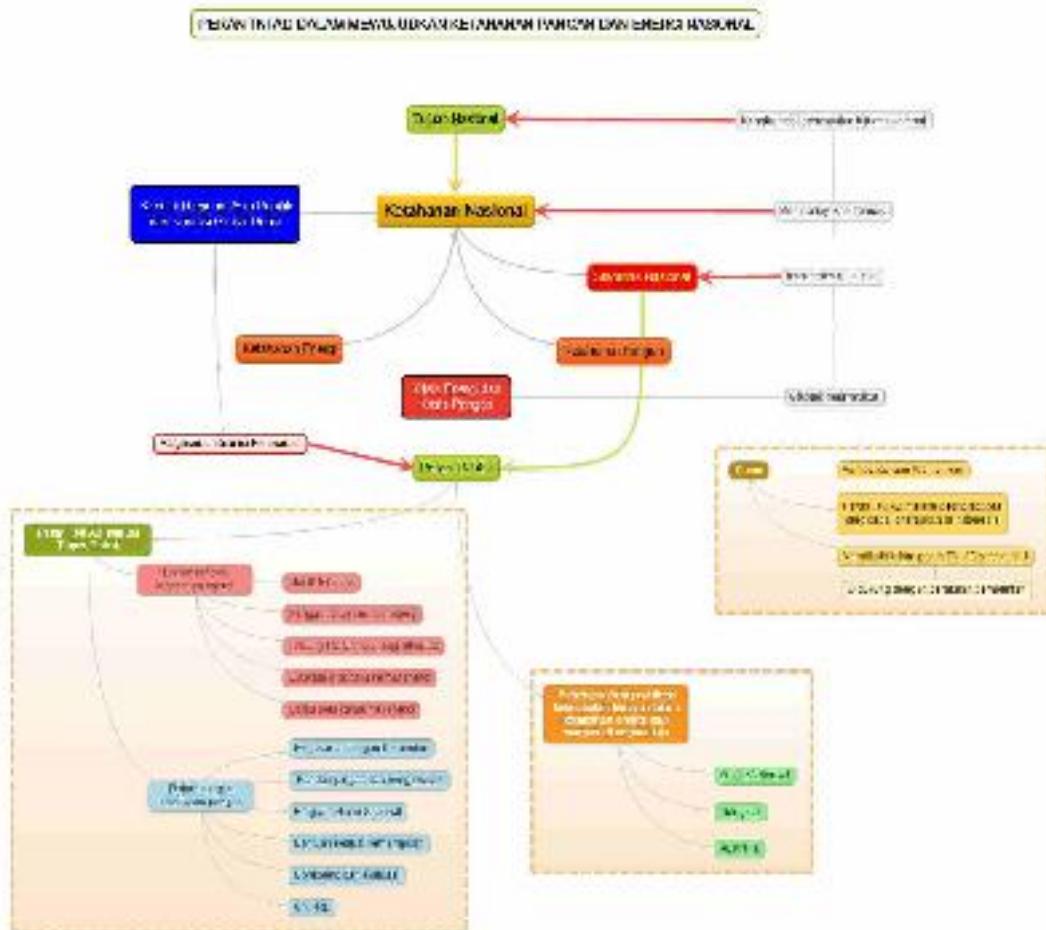
Demikian Kajian Triwulan IV tentang Peran TNI AD dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional dibuat sebagai bahan telaahan bagi pembaca dan pertimbangan bagi pimpinan TNI AD dalam menentukan kebijakan strategis TNI di masa mendatang.

Bandung, Desember 2015  
Komandan Seskoad,

Pratimun, S.Sos  
Mayor Jenderal TNI



## ALUR PIKIR



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam J. Liska and Richard K. Perrin. "Securing Foreign Oil: A Case for Including Military Operations in the Climate Change Impact of Fuels." Environment Magazine. Volume 52. Number 4. 2010: 9-22.
- Ariane Meida. "Kepemilikan Lahan Petani Makin Sempit, Mana Janji SBY." Kompas.com. 23 September 2013 Diunduh dari <http://nasional.kompas.com/read/2013/09/23/1622077/Kepemilikan.Lahan.Petani.Makin.Sempit.pada.26.Okttober.2015>.
- Badan Ketahanan Pangan, diunduh dari [http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar /file/BULETIN%20JULI%202013%20\(1\).pdf](http://bkp.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/BULETIN%20JULI%202013%20(1).pdf). pada 12 Okt 2015.
- Bahari Syaiful. "Landreform Indonesia, Tantangan dan Prospeknya." Jogjakarta: Gajahmadapress. 2015.
- Barry Buzan. "Ole Wæver dan Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis." Copenhagen: School of Security Studies. 1997.
- Biro Pusat Statistik. "Data Kepemilikan Lahan Pertanian." Diunduh dari www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2015.
- Biro Pusat Statistik. "Data Kepemilikan Produksi Pertanian." Diunduh dari www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2015.
- Biro Pusat Statistik. "Nilai Ekspor-Impor Migas." Diunduh dari www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2015.
- Biro Pusat Statistik. "Rata-rata Luas Lahan Pertanian tahun 2003-2013." Diunduh dari www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2015.
- Commonwealth of Australia. "Defence White Paper 2013." Canberra. 2013.
- Esthi Maharani. "Berapa Tingkat Konsumsi Beras Secara Nasional?" diunduh dari Republika Online, 21 Maret 2015. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2015.
- Gawdat Bahgat. "United States' Energy Security: Challenges and Opportunities." The Journal of Social Political and Economic Studies. Volume 35. Number 4. 2010: 411-430.
- International Energy Agency. "World Energy Outlook 2012." Presentation to the press. London, 12 November 2012 pada Jeffrey M. Voth. "In Defense of Energy: Unlocking an Untapped Resource." Harvard Kennedy School Review. Vol. XIII. 2013.
- Iris Gera. "BPS: Jumlah Petani di Indonesia Terus Berkurang." Diakses dari Voice Of America. Edisi 2 Juli 2014. Diunduh pada 26 Oktober 2015
- James Ferguson. "The World's Most Dangerous Place: Inside the Outlaw State of Somalia." London: Transword Publisher.2013.
- Jeffrey M. Voth. "In Defense of Energy: Unlocking an Untapped Resource." Harvard Kennedy School Review. Vol. XIII. 2013: 52-102.
- Jessica Matthews. "The Ethics and Politics of Asylums: Liberal Democracy and the Response of Refugee." Pada Gil Loescher and James Milner. "Protracted Refugee Situations: Domestic and International Security Implications." Routledge Taylor and Francis Group. London and New York: 2007.
- Keputusan Bersama 3 (tiga) Menko No. 09/KEP/MENKO/KESRA/III/2003, KEP.16 /M.EKON/03/2003 dan KEP.08/MENKO/POLKAM/III/2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional.

Keputusan Menteri Kehutanan No.P.03/Menhut-V/2004 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Keterangan tersebut didapat dari wawancara kepada Kasad Jenderal TNI Budiman saat pelaksanaan Seminar Nasional tentang Cyber Warfare di Institut Teknologi Bandung, Sabtu 14 Juni 2014. Ahmad Fikri, "Biofuel Untuk Bahan Bakar Tank," Tempo 15 Juni 2014 diakses dari <http://jakartagreater.com/tni-ad-persiapkan-biofuel-untuk-bahan-bakar-tank/>, pada tanggal 26 November 2015 pukul 15.30 WIB.

Komunika. Vol.10. No. 2. 2007:45-49.

Sterad. "Laporan Realisasi Luas Tanam Berdasarkan Pj Provinsi Melalui Lo PSP." Jakarta. Agustus 2015.

Laurence C. Smith. "The World in 2050, Four Forces Shaping Civilization's Northern Future." Los Angeles: Penguin Publishing Group. 2010.

Michael Agustinus. "Mentan Amran Sulaiman Blak-Blakan Soal Wacana Impor Beras." Diakses dari Detik Edisi 1 Okt 2015. <http://finance.detik.com/read/2015/10/01/073207/3032487/459/mentan-amran-sulaiman-blak-blakan-soal-wacana-impor-beras>. Diunduh pada 22 Okt 2015.

Mabes TNI. Majalah Patriot TNI. Edisi Juni 2007.

Muhammad AS Hikam. "Memperkuat Ketahanan Pangan Demi Masa Depan Indonesia" Jakarta: LIPI. 2014.

Muhammad AS. Hikam (ed). "Ketahanan Energi Indonesia 2015-2025: Tantangan dan Harapan." C.V. Rumah Buku. Jakarta: 2015.

Pemerintah Republik Indonesia. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.

Peraturan Presiden No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Perjanjian Kerjasama Dirjen Prasarana dan Sarana pertanian, Kementerian Pertanian RI dengan Aster Kasad Nomor 06/SR.120/b.1/01/2015 tanggal 2 Januari 2015.

Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBT.

Petunjuk Teknis Kepeloporan TNI Nomor : Juknis/01/1/2004 14 Januari 2004.

Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang Bappenas 2005- 2025.

Retnowati Abdulgani-Knapp. "Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia's Second President." Marshall Cavendish. Singapore: 2007.

Rory Medcalf. "In Defence of the Indo-Pacific: Australia's New Strategic Map." Australia's Journal of International Affairs. Vol. 68. No. 4. 2014: 470–483.

Salim H.S. "Hukum Pertambangan di Indonesia." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Siska Amelie F Deil. "Daftar 29 Bahan Pangan yang Diimpor RI sampai November." Liputan 6 Edisi 4 Januari 2014. Diakses dari <http://bisnis.liputan6.com/read/791549/daftar-29-bahan-pangan-yang-diimpor-ri-sampai-november>. Diunduh pada 12 Okt 2015.

Siti S. Alia dan Agus T. Haryanto. "Motor Hybrid, Bisa Gunakan Bensin dan LPG 3Kg." Diunduh dari VivaNews Edisi tanggal 19 Agustus 2014. Diakses melalui <http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/530337-motor-hybrid-bisa-gunakan-bensin-dan-lpg-3-kg>, pada tanggal 26 November 2015.

Soeleman B.Taneko. "Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial di Indonesia." Jakarta: 1986.

Surat Edaran Menhan RI Nomor SE/24/VIII/2010 tentang Penghematan Energi dan Air serta Pembentukan Gugus Tugas tanggal 4 Agustus 2010.

Surat Telegram Kasad Nomor ST/2160/2015 tentang Upaya Penghematan Energi Listrik dan Air tanggal 7 Agustus 2015.

Trung Chanh. "Vietnam Wins Indonesia Rice Deal For One Million Tons." The Saigon Times. Edisi 8 Okt 2015. <http://english.thesaigontimes.vn/43432/Vietnam-wins-Indonesia-rice-deal-for-one-million-tons.html>. Diunduh 22 Okt 2015.

UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pasal 4, ayat (1).

UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Walter Lippman. "US Foreign Policy: Shield of the Republic." An Atlantic Monthly Press Book. Little Brown and Company: Boston. 1943.

Willy Soeratno. "Transmigrasi dan Tantangan ke Depan." Bogor: Pustaka Rakyat. 2012.

- . "Reinterpretasi Kenaikan Harga BBM." Harian Indo Progress Edisi 28 Juli 2008. Diakses dari <http://indoprogress.com/2008/07/reinterpretasi-kenaikan-harga-bbm/> pada tanggal 6 Oktober 2015.

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT  
SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

**DAFTAR TIM POKJA KAJIAN PERAN TNI AD DALAM MEWUJUDKAN  
KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI NASIONAL**

NO URUT	NAMA	PANGKAT/GOL, KORPS, NRP/ NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pratimun, S.Sos.	Mayjen TNI	Komandan Seskoad	Narasumber
2.	Sonhadji, S.I.P., M.M.	Brigjen TNI	Wadan Seskoad	Narasumber
3.	Yudi Zanibar, S.I.P.	Kolonel Inf 30463	Dirbinjianbang Seskoad	Narasumber
4.	Ch. Abbas Sopamena, S.I.P., M.Si.	Kolonel Inf 30809	Wadirbinjianbang Seskoad	Narasumber
5.	Ahmad Sutarmadi, S.I.P.	Kolonel Inf 1910037630768	Kabidjianbang Terjemen Sdirbinjianbang Seskoad	Kapokja
6.	Raf an, S.I.P., M.M.	Kolonel Czi 32450	Kabidjianbang Straops Sdirbinjianbang Seskoad	wakapokja
7.	Adam Suwarno P, S.Sos., M.M.	Kolonel Inf 32301	Kabidjianbang Juangdoktrinorg Sdirbinjianbang Seskoad	Sekretaris I
8.	Camas Sigit Prasetyo	Mayor Arh 11990055370978	Pabandya Jianbang Terjemen Sdirbinjianbang Seskoad	Sekretaris II

9.	R.P. Ivancius Pr. Siagian, M.A.	Kolonel Inf 32307	Kabidjianbang Ilpengtek/Sospol Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
10.	Parulian Marpaung, S.Sos., M.M.	Kolonel Inf 31235	Kabidjianbangdik Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
11.	Ferry Supriyanto, S.Sos.	Kolonel Kav 30891	Dosen Utama Seskoad	Anggota
12.	Ferry Kistiana A, S.H.	Kolonel Czi 32455	Dosen Utama Seskoad	Anggota
13.	Opan Sopandi, S.E., M.M.	Kolonel Inf 32693	Dosen Utama Seskoad	Anggota
14.	Komaruddin, S.Sos., M.M.	Kolonel Czi 32801	Dosen Madya Seskoad	Anggota
15.	Asep Nugraha, S.E., M.Si., S.H.	Kolonel Inf 1920025581268	Dosen Madya Seskoad	Anggota
16.	Septinus E. Ginting, S.E.	Letkol Inf 1900012060968	Dosen Muda Seskoad	Anggota
17.	Syamsul Bahri MA	Letkol Arm 523622	Kabagminjianbang Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
18.	Irsyad Hamdie Bey A.	Letkol Cpm 11960039361073	Pabandyajianbangdik Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
19.	Ridwan Ali Abdul, S.Sos.	Mayor Czi 11000049341078	Pabandya Jianbang Straops Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
20.	Khazanatul Israr, S.Pd., M.M.	Mayor Arm 11050012990169	Pabanda Jianbang Straops Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
21.	Edwin Charles	Mayor Inf 11010036120878	Pabanda Jianbang Ilpengtek/ Sospol Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
22.	Asep	Mayor Inf 636304	Pabanda Jianbang Juangdoktrinorg Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
23.	Jevrin Fahmier, S.Pd., M.Si.	Mayor Inf 11010016320475	Pabanda Jianbangdik Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
24.	Moh. Rianto	Kapten Cku 21950323840973	Kaurminjianbang Bagminjianbang Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
25.	Sumarjo	Kapten Cpl 587717	Kaurjianbang Bagminjianbang Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota

26.	Susie Kriswulandari	Penata Muda III/a 197305201997032001	Batimin Urdal Sdirbinjianbang Seskoad	Anggota
27.	Subagio	Sertu 31970494750777	Turmin Sdirbinjianbang Seskoad	Pendukung
28.	Asep Cahyawan	Pengatur Tk I II/d 197007171993121000	Operator Komputer Kabidjianbang Dik Sdirbinjianbang Seskoad	Pendukung
29.	Albert Parlindungan	Pengatur II/c 198210162005001003	Operator Komputer Kabidjianbang Straops Sdirbinjianbang Seskoad	Pendukung
30.	Ahmad Kuswari	Pengatur II/c 196505301992081001	Operator Komputer Kabidjianbang Terjemen Sdirbinjianbang Seskoad	Pendukung

